



SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

# RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

# 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala karena atas berkat rahmat dan karuniaNYa penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ini dapat diselesaikan pada waktunya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RENJA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai pada APBD di Tahun 2025. Dokumen ini menjadi salah satu referensi untuk formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan serta memberi manfaat dalam upaya kinerja yang profesional, akuntabel dan transparan untuk pembangunan daerah.

Penyusunan RENJA Tahun 2025 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan. Oleh karena itu, dalam optimalisasi implementasinya diperlukan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan guna mencapai tujuan dan sasaran RENJA Tahun 2025.

Akhirnya, tak lupa kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RENJA Tahun 2025 ini. Semoga dokumen RENJA Tahun 2025 ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Bandung, 26 Juli 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,  
  
Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

## ***Executive Summary***

Dokumen Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Periode 2024-2026 dan disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Secara substansial dokumen ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan disusunnya dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini adalah untuk menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025, serta sebagai panduan pelaksanaan dan sarana pengendalian program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025.

Di Tahun 2023, Sekretariat Daerah telah menjalankan 8 program, 28 kegiatan, dan 86 sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebesar Rp1.670.164.158.655,00 yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.627.897.584.807,00. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar 97,47%. Dari kinerja tersebut, diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 2.53% atau Rp42.266.573.848. Sementara untuk pencapaian indikator sasaran Sekretariat Daerah pada tahun 2023, berhasil mencapai kinerja dengan cukup baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar 99,89%.

Isu-isu penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja serta penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah di Tahun 2025, diantaranya adalah 1. Transisi Perencanaan pada Rencana; 2. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD); 3. Penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, 4. Masa Transisi Tahun Politik, 5. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Untuk tahun 2025, Sekretariat Daerah akan menjalankan 8 (delapan) program, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 740.964.460.330,00 (tujuh ratus empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Adapun seluruh anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan direncanakan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk pencapaian tujuan Setda adalah “Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan” dengan indikator ‘Indeks Reformasi Birokrasi’. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran “Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi” dengan indikator ‘Nilai Reformasi Birokrasi General’. Penentuan indikator ini telah disesuaikan dengan perubahan terhadap tolok ukur pencapaian keberhasilan penerapan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini memperlihatkan peran penting Setda dalam mengubah pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, penjabaran tujuan dan sasaran ini pada level unit terbawah, difokuskan dalam rangka mendukung ketercapaian kondisi tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah memastikan dimensi deregulasi kebijakan yang dijabarkan kepada Biro Hukum dan HAM, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan, serta Biro Perekonomian berkualitas. Selain dari pada itu, memastikan peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa yang dijabarkan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya untuk aspek penataan kelembagaan, pelayanan publik, ketatalaksanaan, budaya kerja, serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimensi pelaporan dijabarkan pula pada Biro Organisasi. Adapun Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum juga turut diamanatkan untuk menunjang kinerja Setda secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Executive Summary</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Diagram</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I. Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II. Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah	52
2.4. Review terhadap Rancangan RKPD	61
2.5. Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder	62
<b>BAB III. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah</b>	<b>76</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah	77
3.3. Program dan Kegiatan	75
<b>BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah</b>	<b>97</b>
<b>BAB V. Penutup</b>	<b>114</b>
<b>Lampiran</b>	<b>115</b>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat s.d. Tahun 2024 (Triwulan I)	8
Tabel 2.2.1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	36
Tabel 2.2.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa	50
Tabel 2.2.3.	Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	51
Tabel 2.4.1.	Review terhadap RKPD Tahun 2025	61
Tabel 2.5.1.	Masukan Stakeholder terhadap Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah	65
Tabel 2.5.2.	Rencana Aktivitas Kinerja Biro sesuai Masukan <i>Stakeholder</i>	67
Tabel 3.1.1.	Keterkaitan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025 dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	77
Tabel 3.2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025	78
Tabel 3.3.1.	Program Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2025	79
Tabel 3.3.2..	Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025	82

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Kategorisasi Stakeholder Setda	63
------------	--------------------------------	----



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan rencana pembangunan daerah. Dokumen Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda) Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Periode 2024-2026 yang disusun dengan mengacu kepada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dan arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 merupakan proses penyempurnaan dari rancangan awal Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah (RKPD), dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting perangkat daerah serta mempertimbangkan masukan dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 yang telah dilaksanakan, evaluasi pelaksanaan kerja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian rencana strategis perangkat daerah.

Provinsi Jawa Barat yang masih berada pada periode transisi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdampak pada keberlanjutan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang masih bersifat teknokratis. Oleh sebab itu, pada rancangan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 memiliki fokus pada optimalisasi keberlanjutan program-program pembangunan periode sebelumnya dengan fokus pemenuhan target kinerja yang sudah direncanakan dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

dinyatakan didalam Renstra yang disesuaikan dengan kebijakan anggaran dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan



10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja bagi Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023**

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan .

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda.

Pada bagian ini mengulas mengenai isu-isu yang berpengaruh pada keberlangsungan pelaksanaan tugas dan kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Pada bagian ini digambarkan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan hasil analisis kebutuhan lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Barat yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan



jangka menengah Renstra Setda 2024-2026. Proses perbandingan ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi sejauh mana konsistensi dan korelasi antar dokumen perencanaan level Pemerintah Daerah dengan dokumen perencanaan level Perangkat Daerah, karena konsistensi perencanaan tersebut penting dalam memastikan terealisasinya kebijakan perencanaan tersebut sampai pada level terluar hingga berdampak pada peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder

Terdapat hasil uraian kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### 3.3. Program dan Kegiatan.



Memuat penjabaran program dan kebijakan serta penjelasan mengenai dasar penetapannya sebagai cara untuk mencapai sasaran.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH.**

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2025.

#### **BAB V PENUTUP**

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindaklanjut.



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 (Triwulan II) dan Capaian Renstra**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan serta 83 (delapan puluh tiga) sub kegiatan, alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.1.389.336.238.098,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1.358.640.417.997,00 dan Belanja Modal Rp.30.695.820.101,00 Penyerapan anggaran tersebut sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) masing-masing adalah Rp.355.536.645.109,00 untuk Belanja Operasi atau 26,17% dan untuk Belanja Modal sebesar Rp.3.810.914.343,00 atau 47,61%. Dengan demikian total penyerapan anggaran tahun 2024 sampai dengan bulan Juni adalah sebesar Rp. Rp.359.347.559.452,000 atau 25,86%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian penyerapan anggaran untuk keseluruhan kegiatan belanja operasi maupun belanja modal termasuk baik.

Secara umum program dan kegiatan tersebut telah berhasil diselenggarakan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Keberhasilan ini dapat berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama serta berdasarkan persentase penyerapan anggaran dan perjanjian kinerja tahun 2024, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Berkaitan dengan indikator tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan-kegiatan konkrit dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja sekretariat daerah provinsi.

Sekretariat Daerah melakukan berbagai program dan kegiatan sebagai penyelenggara perumusan kebijakan umum, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah kepada para perangkat daerah dan menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai penghubung antara Kepala Daerah dengan Perangkat daerah teknis.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, seperti yang dijabarkan dalam tabel 2.1



35B6B8A6A5

**Tabel 2.1.1.**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat s.d. Tahun 2024 (Triwulan II)**

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)				
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>												
1	1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah		Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	N/A	95	90	90	100%	N/A	N/A	N/A	
1	1	1		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	50.20	N/A	N/A	N/A	N/A	50.15	50.15	99.90%	
1	1	1	1	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Rekomendasi/Laporan Bahan Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Ditindaklanjuti	N/A	90	90	90	100%	N/A	N/A	N/A
					Persentase Kebijakan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan yang Diimplementasikan secara Tepat	50.50	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	50.00	99.01%
1	1	1	2	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Rekomendasi/Laporan Bahan Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Ditindaklanjuti	N/A	94	80	80	100%	N/A	N/A	N/A



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)				
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Persentase Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Diimplementasikan secara Tepat	50.50	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	50.00	99.01%			
1	1	3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti	N/A	94	80	80	100%	N/A	N/A	N/A	
				Persentase Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Diimplementasikan secara Tepat	98.53	N/A	N/A	N/A	N/A	97.55	97.55	99.01%	
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum Lingkup Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	N/A	90	90	90	100%	N/A	N/A	N/A
1	1	2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Pemotda	N/A	4	8	8	100%	N/A	N/A	N/A	
1	1	2	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	N/A	65	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
				<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro</b>	86.35	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	115.81%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)				
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		<b>Pemerintahan dan Otonom</b>											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%			
1	1	2	3	<b>BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>									
		<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>		<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		
					<b>Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis</b>	85	N/A	N/A	N/A	N/A	87.1	87.10	102.47%
1	1	3	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pembentukan Hukum Daerah Provinsi	N/A	100	100	100	100%	N/A	N/A	N/A	
				Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah di	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%	



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Bidang Pembentukan Hukum Daerah Provins								
1	1 3 1	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	N/A	100	100	100	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan HAM yang Difasilitasi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
1	1 3 2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	N/A	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
		<b>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum di Lingkup Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia</b>								
1	1 3 3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	12	12	100	833%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas								
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM</b>	<b>87.37</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>86.51</b>	<b>86.51</b>	<b>99.02%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>										
	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti</b>	<b>N/A</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
		<b>Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>50.20</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>50.15</b>	<b>50.15</b>	<b>99.90%</b>



35B6B8A6A5

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pembinaan Mental Spiritual ditindaklanjuti.	N/A	85	90	100	111%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Diimplementasikan secara Tepat	70.70	N/A	N/A	N/A	N/A	70.00	70.00	99.01%
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar ditindaklanjuti	N/A	85	90	100	111%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat	70.70	N/A	N/A	N/A	N/A	70.00	70.00	99.01%
	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Ditindaklanjuti	N/A	85	90	100	111%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Pengembangan	70.70	N/A	N/A	N/A	N/A	70.0	70.00	99.01%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat								
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<i>N/A</i>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>111%</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat yang Akuntabel	<i>N/A</i>	13	13	13	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat	<i>N/A</i>	9	9	9	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	<i>N/A</i>	12	12	12	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>91.34</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<b>90.44</b>	<b>90.44</b>	<b>99.01%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang	100	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	100	100.00	100.00%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disusun sesuai Ketentuan								
		Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
<b>BIRO BADAN USAHA MILIK DAERAH, INVESTASI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>										
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Perekonomian dan Pembangunan	N/A	65	65	65	100%	N/A	N/A	N/A
		Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	50.20	N/A	N/A	N/A	N/A	50.15	50.15	99.90%



35B6B8A6A5

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi/Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan dan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian	N/A	6	16	16	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Investasi Daerah yang Diimplementasikan secara Tepat	50.50	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	50.00	99.01%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMN dan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	N/A	23	23	23	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD yang Diimplementasikan secara Tepat	50.50	N/A	N/A	N/A	N/A	50.15	50.15	99.31%
	<b>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Administrasi Pembangunan</b>	N/A	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>	N/A	N/A	N/A
		<b>Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<b>lingkup Administrasi Pembangunan</b>								
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	N/A	4	4	4	100%	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Disampaikan	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5.00	100.00%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum Lingkup Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan</b>	N/A	100	97	97	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	N/A	4	4	4	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan</b>	<b>89.94</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>88.95</b>	<b>88.95</b>	<b>98.90%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kompetensinya	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tim Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Tenaga Teknis	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>										



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Lingkup Perekonomian dan Pembangunan</b>	N/A	67	67	67	100%	N/A	N/A	N/A
		<b>Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	50.20	N/A	N/A	N/A	N/A	50.15	50.15	99.90%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi/Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan dan Bahan Kebijakan Bidang Perekonomian	N/A	16	16	16	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Diimplementasikan secara Tepat	50.50	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	50.00	99.01%
	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi/Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Serta Bahan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	N/A	17	17	17	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasikan secara Tepat	50.50	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	50.00	99.01%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi</b>	N/A	100	100	100	100	N/A	N/A	N/A



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<b>Keuangan dan Umum Lingkup Biro Perekonomian</b>								
		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	1	1	1	100%	N/A	N/A	N/A
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
		<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>95.29</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>95.20</b>	95.20	99.91%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>								
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Maturitas UKPBJ	3	3	4	3	75%	3	3.00	100.00%
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM UKPBJ	N/A	80	90	90	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	12	6	6	100%	N/A	N/A	N/A
		1) Persentase Proses Pemilihan Penyedia yang Tepat Waktu	98	N/A	N/A	N/A	N/A	96	96.00	97.96%
		2) Persentase Pengadaan Barang Jasa yang Dilaksanakan Tepat Sasaran	98	N/A	N/A	N/A	N/A	96	96.00	97.96%
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pengelolaan LPSE	N/A	12	5	5	100%	N/A	N/A	N/A
		1) Persentase Peningkatan Fitur Sistem Informasi Pengadaan	98	N/A	N/A	N/A	N/A	96	96.00	97.96%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2) Persentase Layanan SPSE yang Dipenuhi	98	N/A	N/A	N/A	N/A	96	96.00	97.96%
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Permasalahan Barang dan Jasa yang Diselesaikan	98	N/A	N/A	N/A	N/A	96	96.00	97.96%
		Nilai Kematangan UKPBJ Dimensi Kelembagaan	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3.00	100.00%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum Lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Biro PBJ yang Berkualitas	N/A	14	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	N/A	40	40	17	43%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>96.91</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>96.82</b>	<b>96.82</b>	<b>99.91%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kompetensinya	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Tim Kerja yang Terpenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%



35B6B8A6A5

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)		
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Tenaga Teknis									
	<b>BIRO ORGANISASI</b>										
	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja yang Efektif dan Efisien</b>	<i>N/A</i>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	
		<b>Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur</b>	<b>4</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<b>3</b>	<b>3.00</b>	<b>75.00%</b>	
	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Provinsi Jawa Barat	<i>N/A</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	
		Presentase Perangkat Daerah yang Ditata Kelembagaannya	<b>90</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<b>80</b>	<b>80.00</b>	<b>88.89%</b>	
		Indikator Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota	<b>85</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<b>80</b>	<b>80.00</b>	<b>94.12%</b>	
		Persentase Peta Jabatan Yang Sesuai Anjab Hasil Verifikasi	<b>100</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>	
		<b>Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal Kategori "B"</b>	<b>94</b>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<b>92</b>	<b>92.00</b>	<b>97.87%</b>	



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik	N/A	51	51	51	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kebijakan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang diinternalisasikan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		<b>Nilai Pelaporan Kinerja</b>	<b>12.44</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>12.35</b>	<b>12.35</b>	<b>99.28%</b>
		Persentase Perangkat Daerah dengan Pelaporan Kinerja Berkualitas	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		<b>Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja Minimal "Baik"</b>	<b>73.68</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>65.79</b>	<b>65.79</b>	<b>89.29%</b>
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Sistem Kerja Dinamis</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>
		Persentase Kebijakan Sistem Kerja Dinamis yang Sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik</b>	<b>85</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80.00	94.12%
		Presentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan	85	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80.00	94.12%
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>N/A</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>105%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
		Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
		<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>88.59</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	<b>87.71</b>	<b>87.71</b>	<b>99.01%</b>
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>									
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Indeks Kepuasan Pimpinan</b>	N/A	Baik	Baik	Sangat Baik	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Waktu Layanan Kerumahtangaan Sekretariat Daerah yang Dilayani	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Waktu Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Waktu Fasilitasi Keprotokolan	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>94.71</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>94.61</b>	<b>94.61</b>	<b>99.89%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Dokumen Pelaporan Kinerja Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Kegiatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Persentase Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)		
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		<b>BIRO UMUM</b>									
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Internal Setda</b>	<i>N/A</i>	<i>Baik</i>	<i>Baik</i>	<i>Baik</i>	<i>Baik</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	<i>N/A</i>	12	12	12	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	<i>N/A</i>	12	12	12	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	<i>N/A</i>	12	12	12	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>N/A</i>	700	700	700	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	<i>N/A</i>	12	12	12	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>N/A</i>	12	12	12	100%	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Waktu Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	N/A	12	12	12	100%	N/A	N/A	N/A
	<b>Program Administrasi Umum</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum</b>	<b>91.58</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>90.68</b>	<b>90.68</b>	<b>99.02%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran Sekretariat Daerah	26.18	N/A	N/A	N/A	N/A	26.15	26.15	99.89%
		Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Nilai Komponen Pelaporan dan Evaluasi Sekretariat Daerah	16.13	N/A	N/A	N/A	N/A	16.11	16.11	99.88%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Dokumen Pelaporan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai dan Pimpinan yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12.00	100.00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah yang Diamankan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Terlayani Tepat Waktu	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Pegawai yang Memenuhi Syarat Kompetensi Jabatan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
		Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Biro yang Terlayani Arsip Dinamis	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Sekretariat Daerah yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah yang Dipelihara	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100.00	100.00%



Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa terdapat perbedaan atau perubahan indikator untuk sub kegiatan tahun 2023 dan 2024, sehingga tabel di atas menjabarkan masing-masing capaian dari setiap indikator subkegiatan masing-masing tahun, namun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 dan pelaksanaan sampai dengan triwulan II (Januari s.d. Juni) Tahun 2024 secara umum telah terlaksana dengan baik sesuai dengan Renja Tahun 2024.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan, dari hasil diatas dapat disampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Tidak terdapat realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. hampir seluruh kegiatan mencapai target yang telah direncanakan.
3. Tidak ada kegiatan/sub kegiatan yang melebihi dari target realisasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan capaian tersebut, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung terpenuhinya target kinerja yaitu pelaksanaan kegiatan yang selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, selain itu adanya monitoring berkelanjutan sehingga dimungkinkan adanya perubahan strategi dalam pencapaian output dapat lebih maksimal dalam hal dukungan waktu dan sumber penggunaan anggaran yang terukur.

Dengan tercapainya target program tersebut dapat disampaikan bahwa target perencanaan strategis lima tahunan perangkat daerah (Renstra PD) dapat terealisasi sesuai target yang telah direncanakan.



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terdapat tiga tugas pokok yang harus dijalankan. Pertama, merumuskan kebijakan umum pemerintah daerah provinsi dan pengoordinasian administratif. Selanjutnya, membina, mengendalikan, dan memfasilitasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Terakhir, melakukan pelayanan administratif. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi (Setda) mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan, monitoring dan evaluasi kebijakan umum pemerintah daerah provinsi;
- b. penyelenggaraan koordinasi, administratif, supervisi, pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah provinsi oleh perangkat daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Setda;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Setda; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) membawahi tiga asisten dan kelompok jabatan struktural. Secara substansi, tugas yang dilaksanakan oleh para asisten sebagaimana tugas pokok pada Sekda namun dengan bidang urusan yang berbeda-beda. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi tiga biro yaitu, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Biro Kesejahteraan Rakyat. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan dengan



penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi fasilitasi administrasi umum, rekomendasi pembentukan daerah otonomi baru, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, serta fasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah. Selanjutnya, Biro Hukum dan HAM menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian administrasi berkenaan dengan penegakkan HAM serta penetapan kebijakan provinsi. Selanjutnya, Biro Kesejahteraan Rakyat menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta fasilitasi pembangunan spiritual masyarakat.

Lalu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi tiga biro yaitu, Biro Perekonomian, Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi dan Administrasi Pembangunan, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Perekonomian menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan dengan pembangunan ekonomi Jawa Barat. Sementara Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan. Terakhir, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan dengan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, Asisten Administrasi Umum membawahi tiga biro yaitu, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum. Biro Organisasi menangani perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif berkenaan dengan manajemen organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meliputi urusan kelembagaan, tata laksana, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan



pelayanan publik. Sementara itu, Biro Administrasi Pimpinan menangani pelayanan kepada pimpinan meliputi materi dan pimpinan, keprotokolan, dan urusan rumah tangga pada rumah dinas pimpinan. Sedangkan, Biro Umum menangani urusan internal Setda dengan memberikan layanan administrasi kepegawaian, rumah tangga, keuangan, kearsipan, serta perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Sasaran strategis Setda diarahkan untuk penciptaan kondisi tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan internal setda sebagai upaya dalam menyelesaikan isu dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, Indikator kinerja Setda. Penentuan sasaran strategis setda didasarkan pada faktor penentu keberhasilan yang diidentifikasi sebagai kunci penyelesaian isu strategis. Sebagaimana pembaharuan yang dilakukan dalam memantapkan penyelenggaraan reformasi birokrasi di tingkat nasional yang membagi fokus implementasi pada reformasi secara umum serta yang dapat memperlihatkan dampaknya kepada pembangunan, setda pun melakukan fokus tersebut. Sesuai dengan kendali kewenangan, maka sasaran strategis setda difokuskan pada pencapaian indikator reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada level general.

**Tabel 2.2.1**

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Ket.
1.	Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi G hjkheneral	80,83	

Sumber: Renstra Setda Tahun 2024-2026

Nilai Reformasi Birokrasi General didukung oleh kinerja sembilan biro yang ada di Setda. Sembilan biro di Setda mendukung sasaran peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Setda. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro



Kesejahteraan Rakyat serta Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan berkontribusi dalam peningkatan kualitas kebijakan. Biro Hukum dan HAM menunjang pencapaian kebijakan yang harmonis. Sasaran pengelolaan barang dan jasa didukung oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sedangkan Biro Organisasi menunjang enam sasaran yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi perangkat daerah, pelayanan publik yang berkualitas, tatalaksana yang berkualitas, kelembagaan yang efektif, budaya yang berakhlak, dan kinerja yang akuntabel. Terakhir untuk sasaran pelayanan internal Setda berkualitas diampu oleh Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum.

Pada Tahun 2023, terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis yang dimiliki oleh Setda, yaitu: Meningkatnya Kualitas Kebijakan; Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan; Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Daerah; Meningkatnya kolaborasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Meningkatnya Kualitas Pembinaan, Pemahaman, Pengamalan Keagamaan; dan Diusulkannya Calon Daerah Otonomi Baru Untuk Pemerataan Pembangunan ke DPRD.

Dari penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran strategis Setda, dapat dijelaskan capaian kinerja ke-6 Sasaran Strategis Renstra Setda pada periode 2018-2023, diantaranya digambarkan pada penjelasan di bawah ini:

### **SASARAN I: MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN**

Sasaran ini memiliki tiga indikator yaitu: (1) Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti; (2) Persentase Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan



dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti, serta (3) Persentase Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan. Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

1. Persentase Bahan Kebijakan Umum Lingkup Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti

Kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkualitas. Hal ini ditandai oleh persentase bahan kebijakan umum lingkup kesejahteraan rakyat yang diampu oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, telah ditindaklanjuti sebesar 101,52% yaitu dari target 98,5% terealisasi 100%. Dilihat dari aspek realisasi, persentase bahan kebijakan umum lingkup kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan sebesar 2% dari realisasi tahun 2022 sebesar 98% dan tahun 2023 sebesar 100%. Dari segi pencapaian kinerja, persentase bahan kebijakan umum lingkup kesejahteraan rakyat mengalami penurunan sebesar 13,77% dari capaian tahun 2022 sebesar 115,29% menjadi 101,52% di tahun 2023. Dari segi perencanaan lima tahunan, persentase bahan kebijakan umum lingkup kesejahteraan rakyat sudah melebihi target akhir Renstra sebesar 101,52% dari target akhir sebesar 98,5% dapat terealisasi sebesar 100% di tahun 2023.

2. Persentase Perumusan Kebijakan Umum Serta Koordinasi, Supervisi, Pembinaan, Pengendalian dalam Aspek BUMD Lembaga Keuangan dan BLUD, BUMD Non Lembaga Keuangan dan Perumusan Kebijakan Umum serta Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dalam Aspek Investasi Pemerintah Daerah, Inovasi Pembiayaan, dan Administrasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti



Di tahun 2023 indikator ini terealisasi sebesar 100% dari yang target sebesar 100%, sehingga kinerja tercapai sebesar 100%. Dari aspek realisasi, indikator ini tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yaitu realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 sama-sama terealisasi sebesar 100%. Kemudian dari segi pencapaian kinerja, indikator ini mengalami penurunan sebesar 11,11%, yaitu dari capaian tahun 2022 sebesar 111,11% menjadi 100% di tahun 2023. Dari segi perencanaan lima tahunan, indikator tersebut sudah mencapai target akhir Renstra sebesar 100% dari target akhir sebesar 100%, dapat terealisasi sebesar 100% di tahun 2023.

### 3. Persentase Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

Pada tahun 2023 kinerja pada indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga kinerja tercapai sebesar 100%. Dari aspek realisasi, indikator persentase penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%. Begitupula dari segi pencapaian kinerja, indikator persentase penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan ini tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu capaian tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%. Dari segi perencanaan lima tahunan, indikator persentase penyelenggaraan kebijakan perekonomian dan pembangunan sudah mencapai target akhir Renstra sebesar kinerja 100%, yaitu dari target akhir Renstra sebesar 100%, terealisasi sebesar 100% di tahun 2023.

## **SASARAN II: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Ketercapaian kinerja pada pada sasaran ini diperlihatkan melalui Nilai Manajemen Perubahan, Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi, Nilai Tatalaksana, Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Harmonis. Adapun perolehan nilai bersumber dari hasil evaluasi Kementerian/Lembaga.

Kategori AKIP dan ITKP merupakan indikator kinerja penyelenggaraan birokrasi yang termasuk ke dalam komponen antara dan komponen hasil sehingga data hasil pengukurannya tersedia setiap tahun. Sementara persentase peraturan perundang-undangan yang harmonis merupakan kinerja yang menggunakan pengukuran mandiri. Adapun untuk Nilai Manajemen Perubahan, Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi, Nilai Tatalaksana, dan Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan kinerja yang pengukurannya merupakan bagian pengukuran pada komponen pengungkit yang pada tahun 2023 data hasil evaluasi tidak tersedia sehubungan dengan adanya perubahan mekanisme evaluasi. Adapun kinerja peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan merupakan kinerja dari Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum dan HAM, serta Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 memuaskan. Hal ini diperlihatkan dari AKIP Provinsi Jawa Barat yang berkategori 'A'. Dengan demikian kinerja AKIP Provinsi Jawa Barat tercapai 100% dari target tahun 2023 berkategori 'A' dapat terealisasi 'A'. Dilihat dari aspek realisasi, AKIP Provinsi Jawa Barat tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu realisasi tahun 2022 dan 2023 berkategori A. Begitu pula jika dilihat dari aspek pencapaian kinerja, AKIP Provinsi Jawa Barat tidak mengalami peningkatan atau penurunan dengan capaian sebesar 100% di tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek perencanaan lima tahunan, AKIP Provinsi Jawa Barat telah mencapai target akhir Renstra kategori 'A' dan terealisasi kategori 'A' di



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

tahun 2023. Bila dibandingkan secara nasional, Jawa Barat menjadi salah satu dari lima provinsi yang memperoleh kategori A disamping Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, Jawa Barat telah melebihi target nasional yaitu 'Baik'.

## 2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

Kualitas dan kapabilitas tata kelola pengadaan barang dan jasa meningkat. Hal ini ditandai dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) sebesar 81,08 poin. Capaian kinerja indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa sudah sangat baik yaitu sebesar 90,09% dengan target sebesar 90 poin dan terealisasi 81,08 poin. Dilihat dari aspek realisasi, indeks tata kelola ini meningkat sebesar 0,88 poin (1,10%) dari tahun 2022 sebesar 80,20 poin dan tahun 2023 sebesar 81,08 poin. Dari segi pencapaian kinerja, indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa mengalami penurunan 10,14% yaitu dari capaian sebesar 100,25% pada tahun 2022 menjadi 90,09% pada tahun 2023. Dari segi perencanaan lima tahunan, indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa tahun 2023 sudah mencapai target akhir RPJMD sebesar 90,09% yaitu dari target sebesar 90 poin terealisasi 81,08 poin. Secara nasional, Jawa Barat menduduki posisi ke 14, dan menduduki posisi ke 4 bila dibandingkan pencapaian di wilayah Pulau Jawa untuk indeks ini.

## 3. Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pemenuhan HAM

Tata Kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat lingkup Sekretariat Daerah pada dimensi deregulasi kebijakan semakin efektif. Hal ini ditandai dengan persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM yang tertata sebesar 100%, yaitu dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%. Dari aspek realisasi, persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu realisasi



35B6B8A6A5

tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%. Begitu pula dari segi pencapaian kinerja persentase penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu capaian tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%. Dari segi perencanaan lima tahunan, penataan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan HAM yang tertata sudah mencapai target akhir Renstra sebesar 100% dari target akhir renstra sebesar 100% dapat terealisasi di tahun 2023 sebesar 100%. Terkait dengan perbandingan dengan nasional, indikator tersebut hanya digunakan di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

#### 4. Nilai Manajemen Perubahan

Sehubungan dengan perubahan mekanisme evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, data Nilai Manajemen Perubahan tahun 2023 tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, capaian kinerja tidak dapat disajikan dikarenakan tidak ada data pembanding. Namun demikian, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan *continuous improvement* reformasi birokrasi atau peningkatan reformasi birokrasi berkelanjutan yang diperlihatkan melalui persentase perangkat daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah minimal kategori 'B' sebesar 89,47%. Ketercapaian perolehan 34 perangkat daerah memperoleh IRB minimal kategori 'B' didorong oleh meningkatnya kualitas tata kelola reformasi birokrasi yang diperlihatkan oleh persentase kebijakan tata kelola reformasi birokrasi yang diinternalisasikan sebanyak 1 kebijakan, persentase pengembangan fitur Surabi yang dapat dioperasikan sebanyak 100%, dan seluruh perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi reformasi birokrasi.



## 5. Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi

Sehubungan dengan perubahan mekanisme evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, data Nilai Penataan dan Penguatan Organisasi tahun 2023 tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, capaian kinerja tidak dapat disajikan dikarenakan tidak ada data pembanding. Namun demikian, kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat cukup tertata. Hal ini diperlihatkan dari peringkat komposit hasil evaluasi kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 68,450 poin atau berada pada status P4. P4 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan. Kemudian, kebutuhan internal organisasi dan dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi yang ada dinilai mampu diakomodir oleh struktur dan proses organisasi. Namun, struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat diatasi dengan segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat manajerial.

## 6. Nilai Penataan Tatalaksana

Sehubungan dengan perubahan mekanisme evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, data Nilai Penataan Tatalaksana tahun 2023 tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, capaian kinerja tidak dapat disajikan dikarenakan tidak ada data pembanding. Namun demikian, sistem kerja dinamis telah dapat diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Penerapan sistem kerja yang dinamis oleh perangkat daerah didorong oleh meningkatnya kualitas sistem kerja dinamis yang diperlihatkan dari persentase kebijakan sistem kerja dinamis yang sesuai ketentuan sebesar 100%. Pendorong selanjutnya adalah peta proses bisnis sesuai kebutuhan kinerja dan mendorong terbentuknya organisasi berbasis kinerja yang



diperlihatkan dari persentase rekomendasi perbaikan proses bisnis yang sesuai ketentuan arsitektur kinerja sebesar 100%.

#### 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sehubungan dengan perubahan mekanisme evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, data Nilai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tahun 2023 tidak dapat diperoleh. Oleh karena itu, capaian kinerja tidak dapat disajikan dikarenakan tidak ada data pembanding. Namun demikian, kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah meningkat yang diperlihatkan dari penerapan kebijakan standar pelayanan publik oleh perangkat daerah sebanyak 100%. Penerapan kebijakan standar pelayanan publik oleh perangkat daerah didorong oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan yang diperlihatkan dari persentase perangkat daerah yang memenuhi standar pelayanan sebesar 100%. Disamping itu, didorong pula oleh pelayanan publik berbasis digital yang diperlihatkan dari persentase pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi 55%.

#### 8. *Skoring* LPPD Provinsi di Tingkat Nasional

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat semakin baik. Hal ini ditandai dengan capaian skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 104,95% dari target skor sebesar 3,354 dan realisasi skor sebesar 3,52 dengan status kinerja tinggi (data tahun 2022 karena data tahun 2023 belum dirilis). Dari aspek realisasi, realisasi skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 3,52. Pada aspek capaian kinerja, capaian skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,31% dari capaian Tahun 2022



sebesar 105,26% sementara pada Tahun 2023 sebesar 104,95%. Dari segi perencanaan lima tahunan, skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah melebihi target akhir Renstra sebesar 104,95% dari target akhir sebesar 3,354 dan realisasi Tahun 2023 sebesar 3,52.

#### 9. Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum

Kinerja fasilitasi administrasi pemerintahan umum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja persentase fasilitasi administrasi pemerintahan umum sebesar 100% dari target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Dari aspek realisasi, realisasi persentase fasilitasi administrasi pemerintahan umum Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Pada aspek capaian kinerja, capaian persentase fasilitasi administrasi pemerintahan umum mengalami penurunan sebesar 11,11% dari capaian Tahun 2022 sebesar 111,11% sementara pada Tahun 2023 sebesar 100%. Dari segi perencanaan lima tahunan, skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah melebihi target akhir Renstra sebesar 100% dari target akhir sebesar 100% dan realisasi Tahun 2023 sebesar 100%.

### **SASARAN III: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN SEKRETARIAT DAERAH**

Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja inti didukung dengan kondisi internal yang kondusif. Bahwa layanan yang diberikan kepada internal setda akan berpengaruh signifikan terhadap capaian kinerja yang mendukung pembangunan Jawa Barat. Capaian sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator indeks kepuasan pengguna layanan internal Sekretariat Daerah yang terdiri dari indikator Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda oleh Biro Umum, Kualifikasi Kepuasan



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Layanan Pimpinan, dan Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan oleh Biro Administrasi Pimpinan.

#### 1. Kualifikasi Kepuasan Layanan Pimpinan

Layanan kepada pimpinan (gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah) di tahun 2023 memuaskan. Hal ini diperlihatkan dari survey kepuasan layanan pimpinan sebesar 95,49 poin dari target sebesar 88,31 poin. Kualifikasi kepuasan layanan pimpinan pada tahun 2023 sangat baik dengan capaian kinerja 108,13% dari target sebesar 88,31 poin dan terealisasi sebesar 95,49 poin. Dari segi realisasi, kualifikasi kepuasan layanan pimpinan menurun 0,09 poin dari target tahun 2022 sebesar 95,58 poin dan realisasi tahun 2023 sebesar 95,49 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, kualifikasi kepuasan layanan pimpinan menurun sebesar 16,63% dari capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 124,76% menjadi sebesar 108,13% pada tahun 2023. Pada perencanaan jangka menengah, capaian kualifikasi kepuasan layanan pimpinan tahun 2023 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 108,13% dari target Renstra 88,31 poin dan terealisasi 95,49 poin pada tahun 2023.

#### 2. Tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan

Tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan menggambarkan Tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan keprotokolan. Adapun capaian tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan pada Tahun 2023 sangat baik dengan capaian kinerja 108,13% dari target sebesar 88,31 poin dan terealisasi sebesar 95,49 poin. Dari segi realisasi, tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan menurun 0,09 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 sebesar 95,58 poin dan Tahun 2023 sebesar 95,49 poin. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan menurun sebesar 16,63% dari capaian



kinerja Tahun 2022 sebesar 124,76% dan pada Tahun 2023 sebesar 108,13%. Pada perencanaan jangka menengah, capaian tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan Tahun 2023 sudah melebihi target akhir Renstra yaitu sebesar 108,13% dari target Renstra 88,31 poin dan terealisasi 95,49 poin pada tahun 2023.

### 3. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Internal Setda

Nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal Setda menggambarkan tingkat kepuasan *stakeholder* yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang diperoleh berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Biro Umum. Adapun capaian nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal setda pada Tahun 2023 sangat baik dengan capaian kinerja 100% dari target kategori A dan terealisasi kategori A. Dari segi realisasi, nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal Setda tidak ada kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 kategori A dan Tahun 2023 tetap di kategori A. Adapun dari aspek pencapaian kinerja, nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal Setda juga tidak ada kenaikan maupun penurunan dari capaian kinerja Tahun 2022 sebesar 100% dan pada Tahun 2023 sebesar 100%. Pada perencanaan jangka menengah, capaian nilai indeks kepuasan pengguna layanan internal Setda Tahun 2023 sudah mencapai target akhir Renstra yaitu sebesar 100% dari target Renstra kategori A dan terealisasi kategori A poin pada tahun 2023.

## **SASARAN IV: MENINGKATNYA KOLABORASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Kolaborasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat meningkat. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sebesar 101,99% dari target sebesar 98,05% dan realisasi sebesar



100%. Dari aspek realisasi, persentase kerja sama yang ditindaklanjuti meningkat sebesar 2,45% dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2022 sebesar 97,55% dan pada Tahun 2023 menjadi 100%. Pada aspek capaian kinerja, persentase kerja sama yang ditindaklanjuti mengalami penurunan sebesar 19,95% dari capaian Tahun 2022 sebesar 121,94% sementara pada Tahun 2023 sebesar 101,99%. Dari segi perencanaan lima tahunan, skor penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sudah melebihi target akhir Renstra sebesar 101,99% dari target akhir sebesar 98,05% dan realisasi Tahun 2023 sebesar 100%.

#### **SASARAN V: PERSENTASE BAHAN KEBIJAKAN LINGKUP BIDANG PEMBINAAN, PEMAHAMAN, DAN PENGAMALAN KEAGAMAAN YANG DITINDAKLANJUTI**

Penetapan kebijakan pembinaan, pemahaman, pengamalan keagamaan yang ditindaklanjuti dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan capaian kinerja persentase bahan kebijakan lingkup bidang pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dari target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Dilihat dari aspek realisasi, persentase bahan kebijakan lingkup bidang pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan yang ditindaklanjuti tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%. Begitu pula dari segi pencapaian kinerja, persentase bahan kebijakan lingkup bidang pembinaan, pemahaman, dan pengamalan keagamaan yang ditindaklanjuti tidak mengalami peningkatan atau penurunan yaitu capaian tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar 100%. Dari segi perencanaan lima tahunan, indikator tersebut pada tahun 2023 sudah mencapai target akhir Renstra sebesar 100%, yaitu dari target akhir renstra sebesar 100% terealisasi sebesar 100%.



## **SASARAN VI: DIUSULKANNYA CALON DAERAH OTONOMI BARU UNTUK PEMERATAAN PEMBANGUNAN KE DPRD**

Calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan yang diusulkan ke DPRD dapat dilakukan sesuai harapan. Hal ini diperlihatkan dari persentase dokumen persyaratan dan kelayakan pemekaran daerah yang dianalisis dapat tercapai sebanyak 100% dari target 100% dan terealisasi 100%. Dari segi realisasi, usulan calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan ke DPRD tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari realisasi tahun 2022 sebesar 100% dan realisasi tahun 2023 sebesar 100%. Begitu pula dari segi capaian kinerja, usulan calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan ke DPRD tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu dari capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%. Sementara dari segi perencanaan lima tahunan capaian usulan calon daerah otonomi baru untuk pemerataan pembangunan ke DPRD telah mencapai target akhir Renstra dengan target sebesar 100% dan terealisasi di tahun 2023 sebesar 100%. Indikator ini hanya digunakan Provinsi Jawa Barat sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Disamping penjelasan mengenai capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, disampaikan pula gambaran capaian kinerja pelayanan Setda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun dari Sembilan biro yang ada di Setda hanya Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai IKK.



**Tabel 2.2.2****Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa**

No	Indikator Outcome	Rumus
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun N / Jumlah kontrak keseluruhan tahun N x 100%
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif / Jumlah seluruh pengadaan x 100%
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan / Total belanja operasi dan modal x 100%
4.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun N - Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun N-1 / Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun N-1 x 100%



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

**Tabel 2.2.3.**

**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat**

No	Indikator Kinerja	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
1	Nilai Reformasi Birokrasi General			N/A	80,75	80,83	80,91	N/A	N/A	80,83	80,91	Proyeksi dihitung berdasarkan kenaikan sebesar 0.08 poin
2	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	
3	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	78,04	N/A	N/A	N/A	
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	34,41	N/A	N/A	N/A	
5	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah		IKK	N/A	N/A	N/A	N/A	177,57	N/A	N/A	N/A	



35B6B8A6A5

### 2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Perangkat Daerah

Terdapat isu-isu penting yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagai *supporting unit* penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025, diantaranya yaitu:

A. Transisi Perencanaan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026;

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di masa transisi yang disusun secara teknokratis. Dokumen tersebut dapat pula menjadi acuan bagi perencanaan jangka menengah selanjutnya bagi Kepala Daerah terpilih.

Dengan akan diadakannya pemilihan Kepala Daerah serentak, maka akan mulai disusun RPJMD Tahun 2025-2030, yang berarti tahun 2025 akan menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025-2030. Selain itu pula, tahun 2025 merupakan tahun awal untuk membangun pondasi sistem perencanaan pembangunan jangka Panjang yang diharapkan dapat mengakselerasi upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

B. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD)

Terbitnya UUHKPD diantaranya bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, sehingga terdapat 16 jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mobilisasi penerimaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Terbitnya UUHKPD ini bagi pemerintahan daerah provinsi berarti porsi bagi hasil pajak provinsi yang diantaranya berupa PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok dibagihasilkan secara proporsional kepada kabupaten/kota mulai tahun 2025. Dampaknya bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, volume APBD akan jauh berkurang sampai dengan Rp. 5,8 triliun, dimana sebagian besar dari nilai tersebut akan beralih ke pemerintah kabupaten/kota.

C. Penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan



Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi local;

Kebijakan penggunaan Produk Dalam Negeri bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik; mengurangi ketergantungan kepada produk impor; dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, memberdayakan industry dengan memperkuat struktur industri melalui peningkatan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi, dan sumber daya manusia dari dalam negeri. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 ini menjadi sarana untuk memaksa penggunaan produk dalam negeri dalam setiap praktik pengadaan barang/jasa di institusi pemerintah.

#### D. Masa Transisi Tahun Politik

Tahun 2025 merupakan masa transisi politik, dimana terjadi pergantian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang nantinya akan berdampak pada proses penyusunan APBD Tahun ANggaran 2025, baik dari segi pembagasan maupun substansi dari rancangan APBD tersebut.

#### E. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Sebagaimana dijelaskan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat pada acara Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat pada 22 Februari 2024, bahwa tahun 2025 diperkirakan ekonomi Jawa Barat akan tumbuh secara berkualitas. Hal ini turut dipengaruhi kondisi nasional maupun global. Oleh karenanya, penting dalam menjaga stabilitas perekonomian, dengan salah satunya menjaga inflasi di kisaran 2-3 persen, sebagaimana capaian nilai inflasi tahun 2023 sebesar 2,48 persen. Diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi di angka 5,00 persen. Selain itu pula beberapa upaya penting lainnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diantaranya membangun sistem digitalisasi ekonomi dan industry yang berbasis teknologi; membangun sistem konektivitas antar wilayah; menjaga stabilitas pangan secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, langkah kolaboratif masih menjadi kunci dalam pembangunan di Jabar. Secara pentaheliks, pembangunan di Jabar setidaknya perlu melibatkan unsur akademisi, bisnis, komunitas, pemerintahan, hingga media guna menghadirkan iklim pembangunan yang kondusif.



Beberapa tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan fungsi dan peranannya pada penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan pada tahun 2025 diantaranya:

**Tantangan yang terjadi di tingkat hulu** merupakan permasalahan yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata Kelola pemerintahan, Hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Tantangan tersebut diantaranya yakni:

1. Birokrasi yang kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Dalam rangka mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan penerapan Reformasi Birokrasi. Oleh karenanya, perlu meningkatkan efektifitas peran-peran tersebut melalui kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Komitmen reformasi birokrasi

Komitmen diperlukan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi yang efektif. Adapun beberapa hal di dalam komponen RB yang perlu menjadi fokus untuk terus ditingkatkan yaitu penguatan implementasi kebijakan arsitektur SPBE, Peningkatan pembangunan ZI, Pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat, Penguatan integritas dan *core values* ASN BerAKHLAK, Peningkatan indeks reformasi hukum, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Maka dibutuhkan komitmen seluruh jajaran mulai dari pucuk pimpinan hingga level terbawah untuk bersama-sama mengawal dan menjaga reformasi birokrasi hingga dapat menjadi contoh keberhasilan dalam mentransformasikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

3. Integritas dan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Disamping itu, dalam hal upaya digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang masih menemui sebuah tantangan dalam mewujudkan



transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan

**Tantangan yang terjadi di tingkat hilir** merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional, diantaranya yaitu:

1. Target indikator kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai SPM

Perlu ada upaya dalam memenuhi SPM di semua urusan, salah satunya di sektor Pendidikan masih terdapat sebanyak 128 kecamatan yang belum mempunyai Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang setara.

2. Pengentasan kemiskinan, penanganan *stunting*, pemenuhan pelayanan dasar, penyediaan infrastruktur seperti pusat pengolahan sampah; penyediaan air bersih; penyediaan jaringan komunikasi agar proses percepatan pemberian layanan masyarakat dapat optimal. Selain itu, pembiayaan melalui *creative financing* untuk dapat mendanai kebutuhan pembangunan daerah, diantaranya dapat melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemanfaatan Dana Umat, *Corporate Social Responsibility* (CSR); pinjaman daerah; obligasi dan sukuk, dana kredit karbon; *Extended producer responsibility* (EPR) yang merupakan bentuk tanggung jawab produsen atas dampak penciptaan produk terhadap lingkungan, dan bentuk pembiayaan kreatif lainnya.
3. Menerapkan *Good Government Governance*, yang terdiri dari 6 hal yaitu partisipasi masyarakat; tegaknya supremasi hukum; transparansi; peduli dan stakeholder; berorientasi pada consensus; kesetaraan; efektivitas dan efisiensi pada proses-proses pemerintahan; akuntabilitas; memiliki visi strategis.



## **Isu-Isu penting yang berlaku di lingkup masing-masing Biro, diantaranya:**

### **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

1. Pembangunan di Jawa Barat belum merata yang didorong dari adanya ketimpangan luas wilayah dan dana transfer
2. Terdapat potensi permasalahan batas daerah Provinsi dan batas pengelolaan sumber daya alam di laut yang menjadi kewenangan Provinsi
3. Capaian LPPD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih berstatus sedang
4. Belum masifnya penyelenggaraan nama rupabumi di tiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Capaian SPM baik Provinsi dan Kab/Kota belum 100%
6. Optimalisasi kerjasama dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan stunting
7. Belum optimalnya Tingkat Efektivitas Implementasi Kerja Sama

### **Biro Hukum dan HAM**

1. Harmonisasi Produk hukum daerah

pentingnya proses harmonisasi peraturan daerah, agar menghindari *overlapping* berbagai regulasi lainnya sehingga nantinya peraturan daerah taat akan asas pembentukan peraturan daerah. Selain itu terdapat tantangan dalam proses harmonisasi dimana proses birokrasi yang panjang dan tidak satu pintu menyebabkan rentang proses harmonisasi memakan waktu yang cukup lama. Sehingga diperlukan sebuah strategi mengatasi hal tersebut dimana pentingnya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia di pemerintah daerah terkait dengan penyusunan peraturan daerah.
2. Bantuan hukum masyarakat miskin dan Advokasi desa

Keterbatasan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum sehingga banyak perkara yang tidak dapat dibiayai. Selain itu pula, terdapat problematika terkait sulitnya memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat bagi Masyarakat miskin, salah satunya karena belum tersedianya peraturan rinci mengenai kriteria miskin yang menyebabkan timbul berbagai penafsiran.



35B6B8A6A5

3. Pelayanan publik berbasis HAM

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis hak Asasi Manusia, mengenai perlunya mewujudkan pelayanan public unit kerja yang berpedoman pada prinsip HAM yang dapat memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas.

**Biro Kesejahteraan Rakyat**

1. Indeks Pemuda Masih di bawah rata-rata nasional
2. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Masih di bawah rata-rata nasional
3. Nilai-nilai agama, motivasi dan kontrol sosial dalam kehidupan individu dan Masyarakat perlu diperhatikan
4. Kesenjangan pendapatan antar wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok Masyarakat, ketimpangan di provinsi jawa barat di tunjukan dengan penetapan upah minimum kab/kota Dimana wilayah utara relative lebih tinggi (diatas rata-rata Rp.3juta) di bandingkan kab/kota wilayah Selatan khususnya wilayah priangan timur (Rp2-2,5juta)
5. Ketimpangan gender masih tinggi dan masih rendahnya perlindungan Perempuan dan anak.

**Biro Perekonomian**

1. Nilai inflasi Provinsi Jawa Barat (Bulan Januari 2024) yang masih berada di atas nilai inflasi nasional.
2. Potensi perubahan iklim yang memicu terjadinya bencana dan hasil produksi tanaman pangan. Terdapat beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat yang terkena dampak perubahan iklim (kekeringan lahan) di 24 kabupaten/kota di Jawa Barat, 238 kecamatan, 655 desa dan kelurahan, 361.000 Kepala Keluarga, serta sebanyak 7.229 Hektar lahan pertanian di tahun 2023.
3. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi ekonomi Jawa Barat yang terintegrasi dengan pasar global
4. Dinamika global seperti konflik, pencarian lapangan kerja, dan perubahan sosial ekonomi dapat menyebabkan pergerakan orang dari dan ke Jawa Barat.



## **Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan**

1. Adanya gap antara kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah dengan anggaran yang tersedia dalam APBD.

Pembiayaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat masih didominasi oleh sumber dana sektoral (APBD), yang mana masih adanya gap antara Kebutuhan Biaya Infrastruktur dengan Kemampuan APBD. Sehubungan dengan adanya gap tersebut, maka diperlukan alternatif pembiayaan salah satunya melalui penerbitan Obligasi dan/atau Sukuk Daerah yang sedang dilakukan inisiasi oleh Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan.

2. Belum seluruhnya BUMD Provinsi Jawa Barat melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Dengan demikian perlu upaya mendorong BUMD dalam implementasi GCG melalui GCG Campaign dan penilaiam GCG BUMD dengan Lembaga independent.
3. Bahwa modal dasar BIJB terbatas, sehingga perlu adanya peningkatan modal dasar. Peningkatan modal dasar dari Rp 2,5 Triliun menjadi Rp 10 Triliun diperlukan sebagai entry point Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Mitra/Investor untuk menyetorkan modal baik berupa cash maupun inbreng (aset tetap) sebagai modal kerja operasional Perusahaan.
4. PT. Agronesia membutuhkan investasi untuk merevitalisasi mesin produksi dan memenuhi modal kerja. Dalam rangka memperluas serta memenuhi permintaan pasar dibutuhkan investasi untuk merevitalisasi mesin produksi dan memenuhi modal kerja, ketentuan dalam Perda Nomor 12 Tahun 2017 membatasi Pemerintah Provinsi untuk memenuhi kebutuhan setoran modal perseroan sesuai dengan rencana bisnis yang disusun perseroan. Peningkatan modal dasar dari Rp350 Miliar menjadi Rp1 Triliun dan pemenuhan modal disetor oleh pemprov sebesar minimal 75% atau Rp750 Miliar.
5. Modal Inti BPR Bogor Jabar, BPR Indramayu Jabar, BPR Karawang Jabar, dan BPR Cianjur masih di bawah Rp50 Miliar. Perkuatan Modal Inti BPR minimal Rp 50 Miliar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2016 dan akan adanya ketentuan POJK terkait kewajiban penggabungan Usaha atau merger BPR untuk kepemilikan saham yang memiliki Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama.
6. Klasterisasi pada hilir migas masih adanya 2 Opsi aksi korporasi antara PT MUJ dan PT Migas Hilir Jabar (MRJ) yang dapat dipilih dan masih belum dilakukan penetapan. PT MUJ diamanatkan dalam Perda 7 tahun 2022 tentang



35B6B8A6A5

Perubahan Bentuk Hukum PT Migas Utama Jabar untuk melakukan penggabungan dan/atau peleburan, pengambilalihan, atau pembubaran pada bidang Energi dan Sumber Daya Mineral maksimal 5 tahun sejak Perda diundangkan.

7. Diperlukan penyelarasan kembali kegiatan Rencana Bisnis BUMD terhadap Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Belum adanya Pedoman Penilaian Kinerja BLUD.

### **Biro Pengadaan Barang/Jasa**

1. Belum optimalnya kepatuhan pelaku pengadaan terhadap kewajiban penyelesaian proses dalam pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik.
2. Belum optimalnya pencatatan realisasi transaksi PDN. Berdasarkan Instruksi Presiden, dalam pengadaan barang dan jasa terdapat kewajiban untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) sesuai komitmen di perencanaan pengadaan, namun terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan tidak terpenuhinya komitmen tersebut, antara lain:
  - Masih melakukan transaksi pembelian dari barang import (bukan PDN)
  - Tidak melaporkan realisasi transaksi dalam penggunaan PDN
  - Transaksi Penggunaan PDN (Produk Dalam Negeri) memerlukan aksi *tagging* PDN pada saat pelaporan transaksi pengadaan barang dan jasa, namun masih banyak terjadi tidak ter-*tagging* nya transaksi tersebut pada aplikasi, sehingga transaksi yang dilaksanakan tidak tercatat sebagai yang menggunakan produk dalam negeri.
3. Rendahnya minat pegawai untuk menjadi PPK dikarenakan risiko dan beban kerja yang cukup tinggi. Sebagai gambaran, risiko yang harus dihadapi seorang PPK cukup berat dan berkaitan juga dengan penggunaan waktu, dimana seorang PPK merangkap juga sebagai pejabat struktural sehingga beban kerja menjadi tinggi karena rangkap jabatan.
4. Rendahnya minat pegawai untuk menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JFPPBJ) dikarenakan risiko yang dihadapi cukup berat dibandingkan dengan jabatan lainnya. JFPPBJ apabila dibandingkan dengan JF lain memiliki tugas dan kewajiban yang terhitung lebih berat. Kaitannya dengan tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa serta risiko yang akan dihadapi dalam tahapan pengadaan barang dan jasa ini. Hal tersebut mengakibatkan pegawai menjadi kurang berminat dalam memilih jabatan JFPPBJ ini dan lebih memilih JF lain.



5. Rendahnya usulan etalase katalog untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah. Perangkat daerah sebagai pengusul etalase katalog masih terhitung belum maksimal, sehingga etalase katalog belum dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari masing-masing perangkat daerah. Usulan etalase katalog yang disampaikan oleh perangkat daerah semestinya telah memaksimalkan usulan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

### **Biro Organisasi**

1. Pelayanan publik yang dilaksanakan hingga saat ini belum memenuhi kebutuhan Masyarakat. Belum semua Perangkat Daerah menetapkan standar pelayanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Terdapat indikasi tusi yang bertentangan dengan peraturan Perundang undangan dan indikasi tumpang tindih tusi baik internal PD maupun eksternal PD
3. Tugas Perangkat Daerah yang ada saat ini cenderung spesifik dan belum menggambarkan beban kerja dan output yang dihasilkan
4. Unit Kerja Pemerintahan Belum memiliki Dasar Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang tetap untuk dibuat menjadi suatu dasar aktifitas kerja dan kinerja sehingga kanal Tunggal Penyelenggaraan Layanan Publik sulit dibangun
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota belum memiliki aplikasi sistem informasi penilaian IRB Perangkat Daerah
6. Masih terdapat ketidaksesuaian antara jenjang jabatan Fungsional dengan target kinerja dan kontribusinya
7. Masih terdapat ketidaksesuaian antara nomenklatur struktur Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Biro Administrasi Pimpinan**

1. Optimalisasi Pelayanan Pimpinan
2. Standarisasi Pelayanan Pimpinan
3. Perluasan jaringan dan ruang komunikasi gubernur dengan Masyarakat
4. Kebutuhan informasi yang cepat dan akurat
5. Digitalisasi Pengagendaan Gubernur



## Biro Umum

1. Menjaga dan melestarikan Gedung Sate sebagai cagar budaya dan pusat pemerintahan
2. Peningkatan layanan dan sarana prasarana layanan publik sekretariat daerah
3. Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah
4. Pegawai Sekretariat Daerah yang berkompeten
5. Pengamanan & penyelamatan arsip vital sekretariat daerah
6. Edukasi dan wisata sejarah gedung sate
7. Mewujudkan program pengelolaan sampah secara *Zero Waste*

### 2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dikaitkan dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berdasarkan analisis kebutuhan dana, dimana program yang telah direncanakan dan diusulkan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024 - 2026 dan Rancangan RKPD Tahun 2025. Namun dari hasil reviu yang dilaksanakan dan setelah melalui koordinasi dan konsultasi semua program yang diusulkan disesuaikan dengan Rancangan RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai besaran anggaran terdapat perbedaan antara rancangan RKPD Tahun 2025 dengan rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian atas kemampuan keuangan daerah yang dalam hal ini APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dari Rumusan dan Program dimaksud sebagaimana disajikan pada Tabel Review Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4.1.**  
**Review terhadap RKPD Tahun 2025**

No	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program	Pagu Indikatif	Program	Kebutuhan Dana
1	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20.150.000.000	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	31.455.710.000



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

No	Rancangan Awal RKPD		Hasil Analisis Kebutuhan	
	Program	Pagu Indikatif	Program	Kebutuhan Dana
2	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	6.275.000.000	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	13.851.375.950
3	Program Kesejahteraan Rakyat	209.692.396.500	Program Kesejahteraan Rakyat	103.383.500.000
4	Program Perekonomian dan Pembangunan	11.489.234.813	Program Perekonomian dan Pembangunan	17.689.579.610
5	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	300,000,000	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	908.765.000
6	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	5.911.000.000	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	8.348.901.000
7	Program Penataan Organisasi	3.360.000.000	Program Penataan Organisasi	4.868.493.900
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	483.786.829.017	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	627.721.371.079

## 2.5. Usulan Program dan Kegiatan Stakeholder

*Stakeholder* Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan individu atau sekelompok orang yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kinerja Setda baik secara langsung maupun tidak. *Stakeholder* Setda dapat termasuk didalamnya pihak-pihak yang mengatur bagaimana Setda berkinerja. Untuk menetapkan bahwa suatu pihak merupakan *stakeholder* Setda, dilakukan analisis *stakeholder*.

Dari hasil identifikasi pemangku kepentingan di setiap biro, Kementerian/Lembaga serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah termasuk ke dalam kategori *context setters*. Mereka merupakan pihak yang memiliki pengaruh kuat terhadap apa yang harus dilakukan oleh Setda dan bagaimana melakukannya. Namun demikian, tidak serta merta terlibat langsung dengan proses yang berlangsung. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh Setda adalah melakukan arahan yang diberikan dan melaporkan perkembangan proses kinerja secara berkala.

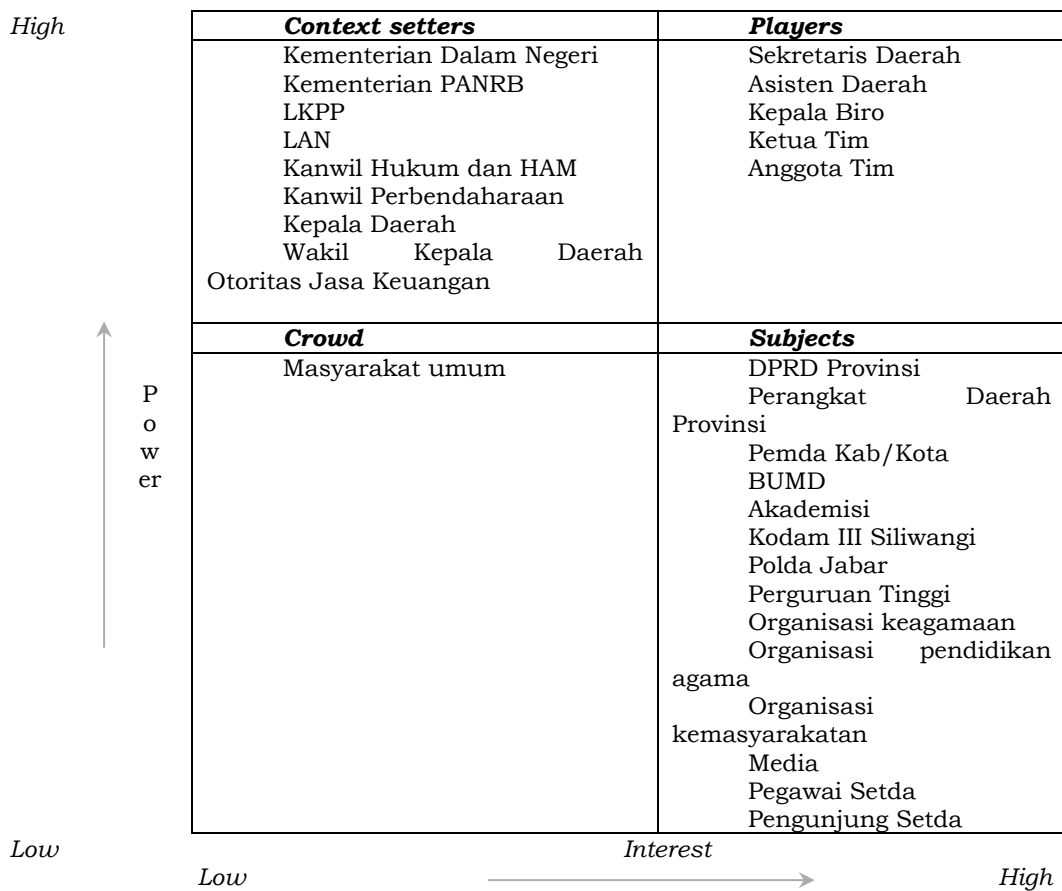


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Selanjutnya Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala Biro, dan pegawai Setda dalam konteks Ketua Tim dan Anggotanya merupakan *stakeholder* yang termasuk ke dalam kategori *players*. Mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dan ketertarikan yang tinggi terhadap proses, perkembangan, dan dampak kinerja Setda. Seluruh pihak ini perlu melakukan kolaborasi dan harus dilibatkan secara langsung.

**Diagram 1 Kategorisasi Stakeholder Setda**



Untuk kategori *subjects*, mencakup DPRD Provinsi, Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kodam III Siliwangi, Polda Jabar, Akademisi, Organisasi keagamaan, Organisasi pendidikan agama, Organisasi kemasyarakatan, media, pegawai Setda, dan pengunjung Setda. Mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap kinerja Setda namun memiliki pengaruh yang rendah. Kemudian pada kategori terakhir yaitu *crowd* adalah masyarakat umum yang dapat memiliki kebutuhan terhadap kinerja Setda seperti informasi maupun



data namun pengaruh maupun ketertarikannya rendah. Dari diagram kategorisasi stakeholder Setda, urutan prioritas *stakeholder* dari tinggi ke rendah adalah:

1. *Players*;
2. *Context setters*;
3. *Subjects*;
4. *Crowd*.

Masukan *stakeholder* untuk Renja Tahun 2025 dilakukan melalui pelaksanaan FPD Setda pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 bertempat di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22, Bandung. Kegiatan ini berfokus dalam mengumpulkan masukan dari *stakeholder* eksternal. Acara dihadiri oleh 210 dari unsur perangkat daerah, 22 dari unsur BUMD, DPRD, 2 dari unsur Universitas, 23 dari unsur kabupaten/kota, dan 6 unsur instansi vertikal. Perolehan masukan dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama secara daring yaitu melalui penyebaran tautan format masukan pada <https://linktr.ee/forumsetda2024>. Di dalamnya disampaikan Ranwal Renja Tahun 2025, *outline* Ranwal Renja Tahun 2025, dan format masukan *stakeholder*. Adapun mekanisme ke dua dilakukan secara luring yaitu penyampaian masukan langsung oleh undangan yang hadir pada FPD.

Terdapat 13 instansi yang memberikan masukan terhadap Ranwal Renja Setda Tahun 2025 terdiri dari 7 instansi pusat, 1 BUMD, 1 perangkat daerah, 1 universitas, dan 2 sekretariat daerah kabupaten/kota. Beberapa hal yang disoroti oleh *stakeholder* adalah program dan kegiatan, inovasi, kolaborasi, dan penguatan internal. Terkait program dan kegiatan, terdapat saran untuk memasukkan kegiatan berkenaan dengan pengukuran kualitas kebijakan serta pengadaan barang dan jasa. Berkaitan dengan inovasi, saran yang disampaikan adalah perlu adanya inovasi dalam pengukuran kinerja terutama yang bersifat lintas fungsi yang berada dalam lingkup koordinasi Setda. Selanjutnya berkaitan dengan kolaborasi, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disarankan untuk selalu berkolaborasi dengan instansi pusat terutama dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja. Ada pun untuk penguatan internal, terdapat *stakeholder* yang menyoroti perlunya penguatan internal termuat dalam Renja Setda Tahun 2025.

Selain masukan yang diterima melalui tautan formulir masukan, Setda juga menerima masukan yang disampaikan melalui <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>. Pemberi masukan adalah organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, organisasi pendidikan agama, dan perguruan tinggi. Masukan berupa ajuan permohonan tambahan sumber daya berupa hibah kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa



Barat melalui Setda atau secara spesifik Biro Kesejahteraan Rakyat. Pemenuhan kebutuhan para stakeholder tersebut merupakan tugas rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun pemenuhan kebutuhan dilakukan terhadap infrastruktur dan operasional lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan agama. Hibah infrastruktur dipergunakan untuk membangun atau memperbaiki bangunan masjid, kobong, asrama atau ruang kelas baru sedangkan untuk biaya operasional disalurkan untuk pelaksanaan kegiatan, pembayaran honor tenaga pendidik atau untuk operasional kesekretariatan. Ada pula hibah pendidikan yang merupakan hibah yang diperuntukan bagi lembaga diluar kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, contohnya hibah untuk perguruan tinggi.

**Tabel 2.5.1**

**Masukan Stakeholder terhadap Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah**

No	Stakeholder	Masukan	Biro
1.	Badan Pusat Statistik	Koordinasi data sektoral	Seluruh biro
2.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk melaksanakan kegiatan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan</li> <li>2. Untuk melaksanakan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK</li> <li>3. Untuk melaksanakan kegiatan peningkatan pengadaan melalui <i>e-purchasing</i></li> <li>4. Untuk melaksanakan kegiatan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro Hukum dan HAM, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan</li> <li>2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>4. Biro Umum</li> </ol>
3.	Pusdiklatbang PKASN Lembaga Administrasi Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertimbangkan tren perkembangan global, perkembangan teknologi, program prioritas presiden, dan program prioritas daerah dalam menentukan isu strategis</li> <li>2. Mempertajam program penguatan perencanaan dan evaluasi kebijakan yang diperankan Setda</li> <li>3. Mempertajam teknik <i>cascading</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh biro</li> <li>2. Biro Hukum dan HAM</li> <li>3. Seluruh biro</li> </ol>
4.	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Kemdikbudristek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berbagi informasi berkenaan dengan beasiswa bagi dosen/mahasiswa</li> <li>2. Memanfaatkan SDM perguruan tinggi untuk kepentingan pembangunan melalui perekrutan tenaga ahli</li> <li>3. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukan kewenangan Setda</li> <li>2. Seluruh biro</li> <li>3. Seluruh biro</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

No	Stakeholder	Masukan	Biro
5.	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat	Untuk berkolaborasi kegiatan bersama dalam: 1. monitoring dan evaluasi penyerapan dana transfer ke daerah, 2. pembinaan BLU daerah, dan 3. pembinaan UMKM	4. Setda tidak mengelola dana transfer 5. Biro BIA 6. Bukan kewenangan Setda
6.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Untuk melakukan kolaborasi berkenaan dengan pengharmonisasian produk hukum daerah provinsi, analisis dan evaluasi produk hukum daerah, pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, bantuan hukum non litigasi untuk menghindari <i>double claim</i> dalam <i>reimbursement</i> , serta penyuluhan hukum	Biro Hukum dan HAM
7.	Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat	Pengawasan pelayanan publik kabupaten/kota harus menjadi prioritas serta pembinaan pelayanan publik harus selaras dengan SPM	Biro Organisasi
8.	Dinas Sosial Provinsi	Menyarankan agar berfokus pada kesejahteraan masyarakat	Biro Kesejahteraan Rakyat
9.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor	Agar program-program provinsi dapat berinterelasi dengan program kabupaten/kota	Seluruh biro
10	Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan	Agar Setda provinsi dapat menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan sehingga dapat digunakan dan sinergi dengan capaian kinerja sekretariat daerah kabupaten/kota	Biro Umum Biro Organisasi
11	Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka	Ada pertemuan rutin lingkup Setda atau Asisten	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
12	BUMD	Kolaborasi dalam pengolahan sampah Setda	Biro Umum
13	Universitas Padjadjaran	1. Menyarankan adanya inovasi dalam program dan kegiatan 2. Menyarankan adanya program penguatan internal 3. Menyarankan adanya perhitungan impact 4. <i>Maintaining</i> satudata Jawa Barat 5. Program <i>zero waste</i> Setda juga melibatkan masyarakat sekitar	Seluruh biro

Dari seluruh masukan *stakeholder*, selain yang bukan merupakan wewenang Setda, telah masuk ke dalam rencana kerja setiap biro. Beberapa masukan yang dapat diuraikan misalnya terkait koordinasi data sektoral, pengumpulan dan pengolahan data merupakan bagian dari aktivitas kinerja yang didukung oleh



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

sumber daya melalui penggunaan Sub Kegiatan Pengumpulan Data Sektoral serta penetapan Jawara Data pada setiap Biro. Koordinasi intensif dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata dilakukan untuk memastikan data terintegrasi dan termanfaatkan baik oleh instansi pemerintah maupun publik.

Terkait kolaborasi dan keterlibatan SDM perguruan tinggi juga dilakukan baik pada saat proses perencanaan kinerja, pelaksanaan, maupun evaluasi dan pelaporan kinerja. Keterlibatan para akademisi diperlukan agar sudut pandang para ahli dari aspek teori dapat tersedia yang esensial dalam memperkaya informasi bagi pengambilan keputusan. Untuk tahun 2025, kolaborasi dengan SDM perguruan tinggi direncanakan dilakukan antara lain dalam perumusan kebijakan penanganan stunting, pembangunan infrastruktur, penyusunan pendapat hukum dan produk hukum daerah, pelibatan dalam Dewan Pendidikan, pelibatan dalam pengembangan dan pemberdayaan pesantren, serta penyusunan rencana strategis dan pelaporan kinerja Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, beberapa program kerja Setda telah terinterelasi dengan program-program kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh: *Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota* dipastikan selaras dengan *Road Map Reformasi Birokrasi* milik Provinsi Jawa Barat juga penyusunan SOP pelayanan pimpinan yang dapat diaplikasikan oleh seluruh Setda Kabupaten/Kota. Program-program lainnya berinterelasi terutama dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi seperti evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota serta monev proses pengadaan barang dan jasa. Secara spesifik per biro, aktivitas-aktivitas kinerja yang direncanakan dan telah mengkomodir masukan stakeholder disajikan dalam Tabel 2.5.2

**Tabel 2.5.2**  
**Rencana Aktivitas Kinerja Biro sesuai Masukan Stakeholder**

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
1	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> <li>2. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja yang diperoleh melalui proses e-Purchasing</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>4. Penajaman cascading dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang agile dan adaptif</li> <li>5. SDM perguruan tinggi dilibatkan dalam usulan pembentukan daerah persiapan otonomi baru di Jawa Barat, penamaan rupabumi di Jawa Barat, dan penyusunan kajian rincian urusan pemerintah daerah provinsi</li> <li>6. Program penguatan internal akan dilakukan melalui optimalisasi mekanisme kinerja internal</li> <li>7. Melaksanakan Rapat Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat se-Jawa Barat dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
2	Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> <li>2. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja berupa laptop dan komputer beserta kelengkapannya seperti printer dan scanner yang diperoleh melalui proses <i>e-Purchasing</i></li> <li>3. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>4. Penajaman program penguatan perencanaan dan evaluasi kebijakan yang diperankan Setda dilakukan melalui analisis dan evaluasi produk hukum daerah provinsi</li> <li>5. Penajaman <i>cascading</i> dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>6. SDM perguruan tinggi dilibatkan dalam penyusunan pendapat hukum dan penyusunan produk hukum daerah</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM selalu dilakukan terkait Pelaporan Aksi HAM serta Pelayanan Publik Berbasis HAM</li> <li>8. Interelasi program dengan kabupaten/kota dilakukan melalui rapat koordinasi Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota</li> <li>9. Program penguatan internal akan dilakukan melalui optimalisasi mekanisme kinerja internal</li> </ol>
3	Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> <li>2. Penghitungan kualitas kebijakan dilakukan setiap tahun semenjak tahun 2022 sehubungan dengan Nilai Kualitas Kebijakan menjadi indikator kinerja biro</li> <li>8. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja untuk pengolahan data dan media informasi, yang diperoleh melalui proses <i>e-Purchasing</i></li> <li>9. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>10. Penajaman <i>cascading</i> dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>11. SDM perguruan tinggi dilibatkan dalam Dewan Pendidikan serta Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren Di Daerah Provinsi Jawa Barat</li> <li>12. Fokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan biro adalah pada pemberian hibah serta penetapan upah minimum regional</li> <li>13. Program penguatan internal akan dilakukan melalui peningkatan intensitas evaluasi kinerja oleh pimpinan</li> <li>14. Perhitungan <i>impact</i> telah dilakukan melalui perhitungan Nilai Kualitas Kebijakan yang menjadi alat ukur keberhasilan kinerja biro</li> <li>15. Komitmen dalam penyelenggaraan satudata Jawa Barat dilakukan melalui pembaharuan Jawara Data</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
4	Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> <li>2. Nilai kualitas kebijakan menjadi tolok ukur dalam mengukur kinerja Biro Perekonomian sehingga aktivitas penilaian kualitas kebijakan sebagai bahan bagi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan telah dilakukan</li> <li>3. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja yang diperoleh melalui proses <i>e-Purchasing</i></li> <li>4. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>5. Salah satu isu yang diangkat Presiden dan berada dalam ranah kinerja Biro Perekonomian adalah inflasi dan investasi. Biro Perekonomian menjadi salah satu unit kerja yang melakukan pengawasan dalam perkembangan inflasi dengan pengumpulan informasi harga barang pokok di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat melalui aplikasi SiLinda. Dilakukan pula kolaborasi dengan Bank Indonesia serta ekonom di Jawa Barat dalam upaya pengendalian inflasi. Adapun terkait investasi, pengawasan terhadap percepatan investasi daerah dilakukan dalam mendorong peningkatan investasi di seluruh Jawa Barat</li> <li>6. Penajaman <i>cascading</i> dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>7. Kolaborasi dengan SDM perguruan tinggi dilakukan melalui perekrutan tenaga ahli Program Penguatan Ekonomi Syariah Jawa Barat, Program Regenerasi Petani, serta Program Pengendalian Inflasi</li> </ol>
5	BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> <li>2. Nilai kualitas kebijakan menjadi tolak ukur dalam mengukur kinerja Biro BUMD, Investasi, dan</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
		<p>Administrasi Pembangunan sehingga aktivitas penilaian kualitas kebijakan sebagai bahan bagi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan telah dilakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja berupa ATK, komputer, laptop dan printer yang pengadaannya dilakukan melalui proses <i>e-Purchasing</i></li> <li>4. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>5. Upaya penetapan kebijakan terkait sukuk dan obligasi daerah terus dilakukan sebagai implementasi dari UU No. 1 Tahun 2022. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Inisiasi Alternatif Pembiayaan (<i>Creative Financing</i>) Infrastruktur Pembangunan Daerah melalui Obligasi Daerah/Sukuk Daerah</li> <li>6. Penajaman cascading dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>7. Sudah dilakukan kolaborasi kegiatan dengan Kemenkeu dan Kemendagri dalam hal pembinaan BLUD, antara lain serta konsultasi terkait regulasi, kerjasama, remunerasi BLUD. Selain itu, Kemenkeu dan Kemendagri juga diundang sebagai narasumber dalam pembinaan BLUD</li> <li>8. Dalam hal pembinaan dan evaluasi BUMD pula telah berkolaborasi dengan Akademisi, APIP dan Kementerian terkait</li> <li>9. Pemanfaatan SIMOLEK dan SIMPELKEU dalam memonitor kinerja BUMD merupakan hasil dari inovasi yang diinisiasi sejak tahun 2018</li> <li>10. Mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik/<i>Good Corporate Governance</i> (GCG) oleh BUMD Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan <i>GCG Campaign</i></li> </ol>
6	Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Untuk mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK Biro Pengadaan Barang dan Jasa melakukan penambahan etalase katalog elektronik lokal, pendampingan, dan pencatatan transaksi penggunaan produk dalam negeri. Sementara untuk kepentingan internal peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja dimana untuk tahun 2025 akan dilakukan pengadaan LED/papan interaktif, alat komunikasi berupa HP atau Tab, komputer dan laptop untuk mendukung program dan kegiatan peningkatan produk dalam negeri</li> <li>3. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>4. Isu strategis lingkup pengadaan barang/jasa sudah mempertimbangkan komitmen percepatan peningkatan pemakaian produk dalam negeri dan produk UMKM dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia</li> <li>5. Penajaman cascading dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>6. Interelasi program kegiatan dilakukan dengan UKPBJ kabupaten/kota dalam monitoring dan evaluasi progres pengadaan yang juga dilakukan di 2025. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui pembinaan dan pendampingan kepada Kabupaten/Kota seperti pencapaian tingkat kematangan kabupaten/kota, pembinaan kepada pelaku pengadaan khususnya kepada pengelola pengadaan barang/jasa, dashboard monitoring dan evaluasi proses pengadaan di Kabupaten/Kota.</li> <li>7. Monitoring dan evaluasi progres pengadaan di tahun 2025 dilakukan melalui <i>dashboard</i> yang diinisiasi di tahun 2023 agar proses monev dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif</li> </ol>
7	Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan</li> </ol>



No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
		<p>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja yang diperoleh melalui proses <i>e-Purchasing</i>. Untuk tahun 2025 rencana pengadaan untuk <i>display LED</i> dan <i>laptop</i> di awal triwulan 2</li> <li>3. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>4. Penetapan program dan kegiatan lingkup organisasi telah mempertimbangkan arah kebijakan reformasi birokrasi yang memfokuskan kepada dua hal yaitu general dan tematik. Pengendalian rencana aksi reformasi birokrasi oleh perangkat daerah serta penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi yang memuat rencana jangka menengah Provinsi Jawa Barat akan dilakukan di tahun 2025. Selain itu, untuk memastikan program-program reformasi birokrasi tematik terarah dan terlaksana, pengembangan terhadap arsitektur kinerja (pengentasan kemiskinan, stunting, inflasi, investasi, dan penggunaan produk dalam negeri) serta aplikasi pengendalian kinerja akan dilakukan secara berkelanjutan di tahun 2025</li> <li>5. Penajaman <i>cascading</i> dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>6. Kolaborasi dengan SDM perguruan tinggi dilakukan melalui perekrutan tenaga ahli. Untuk tahun 2025 keterlibatan tenaga ahli dari perguruan tinggi akan dilakukan dalam penyusunan LKIP dalam memberikan pendapat ahli terhadap permasalahan yang ditemui dan penyusunan standar pelayanan publik yang merupakan kelanjutan dari program tahun 2023 dan 2024</li> <li>7. Di semester 2 tahun 2025 akan dilakukan pembinaan standar pelayanan publik kepada kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kualitas standar pelayanan minimal pemerintah daerah kabupaten/kota</li> <li>8. Penyusunan road map reformasi birokrasi kabupaten/kota diarahkan untuk selaras dengan</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
		<p>Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga program, kegiatan, serta aktivitas di dalamnya berinterelasi dengan provinsi</p> <p>9. Pemerintah daerah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan standar indikator kinerja untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota</p> <p>10. Pemanfaatan fitur-fitur kinerja dalam Japati merupakan inovasi yang akan terus dikembangkan dalam rangka mendukung efektivitas kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat</p>
8	Administrasi Pimpinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> <li>2. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja berupa pengadaan Printer, Laptop, dan Komputer yang diperoleh melalui proses <i>e-Purchasing</i></li> <li>3. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>4. Penajaman <i>cascading</i> dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>5. Interelasi program dan kegiatan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota direncanakan dilakukan melalui penyusunan SOP Pelayanan Pimpinan.</li> </ol>
9	Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen dalam penyelenggaraan data sektoral direpresentasikan melalui penggunaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah dan penetapan Jawara Data</li> <li>2. Sesuai ruang lingkup kewenangan, peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKK dilakukan melalui pemastian dalam penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja. Komitmen P3DN terus diupayakan dan ditingkatkan lagi capaiannya dalam rangka mendukung reformasi birokrasi tematik Provinsi Jawa Barat</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

No	Biro	Rencana Aktivitas Kinerja
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penggunaan kartu kredit pemerintah dilaksanakan sebagai mandat dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan biro</li> <li>4. Penajaman <i>cascading</i> dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan sebagai perwujudan dari pemerintahan yang <i>agile</i> dan adaptif</li> <li>5. Kolaborasi dengan SDM Perguruan Tinggi direncanakan dilakukan melalui metode perekrutan tenaga ahli dalam penajaman penyusunan rencana kinerja Sekretariat Daerah</li> <li>6. Dalam hal kolaborasi terkait pengolahan sampah Setda dengan BUMD di tahun 2025, telah dilakukan pengadaan alat pengurai sampah</li> <li>7. Program <i>zero waste</i> dalam pengelolaan sampah di lingkungan kantor Setda diluncurkan pada saat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan akan memasuki tahapan penyusunan kebijakan. Hingga saat ini pembahasan belum memasuki tahapan pelibatan pihak ketiga dalam pengelolaannya.</li> </ol>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pemerintah pusat telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang akan menjadi acuan Kementerian/Lembaga dalam Menyusun rencana kerja K/L serta menjadi acuan pemerintah daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKP Tahun 2025 merupakan tahapan awal untuk Indonesia Emas 2045, sekaligus merupakan tahap pertama Pembangunan RPJMN 2025-2029 yang berfokus pada Penguatan Fondasi Transformasi. Adapun tema RKP Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan”

Berdasarkan arah kebijakan RKP Tahun 2025, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok merumuskan dan menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengoordinasian administratif, membina, mengawasi, mengendalikan, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah Provinsi dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf ahli Gubernur, memiliki kontribusi atau mendukung terhadap seluruh arah kebijakan RKP Tahun 2025.



**Tabel 3.1.1.**

**Keterkaitan Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025 dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat**

<b>Arah Kebijakan Nasional Tahun 2025</b>	<b>Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah</b>	<b>Unit Kerja Terkait</b>
1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa	Penyiapan Pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kesehatan	Biro Kesejahteraan Rakyat
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah	Perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative bidang infrastruktur daerah, energi dan pertambangan, dan lingkungan hidup	Biro Perekonomian
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan	Perumusan kebijakan umum, pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative bidang perekonomian	Biro Perekonomian

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tugas utama Setda adalah dalam perumusan kebijakan umum daerah provinsi serta dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam perumusan kebijakan, Setda melakukan penyusunan dan fasilitasi penyusunan kebijakan kepada perangkat daerah. Fasilitasi dilakukan dari semenjak perencanaan hingga evaluasi untuk melihat dampak kemanfaatan kebijakan kepada masyarakat. Sementara itu, pada penerapan tata kelola pemerintahan, Setda menjadi koordinator utama dalam



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

implementasi reformasi birokrasi. Termasuk di dalamnya pengupayaan kebijakan yang berkualitas.

Atas dasar hal tersebut, konsisten dengan salah satu sasaran pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, tujuan Setda adalah “Meningkatnya Kualitas Dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan” dengan indikator ‘Indeks Reformasi Birokrasi’. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran “Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi” dengan indikator ‘Nilai Reformasi Birokrasi General’. Penentuan indikator ini telah disesuaikan dengan perubahan terhadap tolok ukur pencapaian keberhasilan penerapan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh KemenPAN RB.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ini memperlihatkan peran penting Setda dalam mengubah pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, penjabaran tujuan dan sasaran ini di level bawah difokuskan dalam rangka mendukung ketercapaian kondisi tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah pemastian deregulasi kebijakan yang dijabarkan kepada Biro Hukum dan HAM, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro BUMD Investasi dan Administrasi Pembangunan, serta Biro Perekonomian. Kemudian peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa dijabarkan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Selanjutnya untuk penerapan lima area perubahan pada reformasi birokrasi dijabarkan pada Biro Organisasi. Adapun Biro Administrasi Pimpinan dan Biro Umum diamanatkan untuk menunjang kinerja Setda secara keseluruhan.

**Tabel 3.2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025**

	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Provinsi Jawa Barat	Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A
Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	Meningkatnya praktik baik reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi General	Poin	80,83



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

### 3.3. Program dan Kegiatan

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, penyusunan RKPD Tahun 2025 didasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi dari kebijakan.

Program adalah rangkaian kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Dalam melaksanakan suatu program dibutuhkan suatu indikator program dimana indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah berkembang/berubah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif.

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan dan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan. Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2025 agar target-target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal. Dukungan program Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 terhadap arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, modal, sosial budaya dan transformasi digital, disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.3.1.**  
**Program Prioritas Sekretariat Daerah Tahun 2025**

Pengarusutamaan ( <i>mainstreaming</i> )	Program Prioritas Tahun 2025	Perangkat Daerah
<b>Aspek I: Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)</b>		
Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Pengarusutamaan ( <i>mainstreaming</i> )	Program Prioritas Tahun 2025	Perangkat Daerah
Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
Goal 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum dan HAM
	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
<b>Aspek II: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menciptakan manajemen pembangunan dan pengelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi yang bersandar pada kepentingan rakyat</b>	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi

Penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Adapun program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 berjumlah 8 (delapan) program, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 740.964.460.330,00 (tujuh ratus empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 meliputi:

- Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan, dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
- Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
- Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
- Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
- Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
- Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat pada RKPD Tahun 2025 ke dalam Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat disajikan pada table berikut.



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

**Tabel 3.4. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025**

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan, dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Pengendalian Inflasi	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);</li> <li>2. Meningkatkan efektivitas Pemantauan pengendalian inflasi;</li> <li>3. Penyusunan kebijakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pertanian organik sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah provinsi untuk menghadirkan pertanian berkelanjutan.</li> </ol>		Biro Perekonomian
				Pengelolaan fitur Kinerja Pengendalian Inflasi dalam aplikasi Japati (E-Sakip) <a href="https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip">https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip</a>		Biro Organisasi
		Pengembangan KEK	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan KEK dengan segala potensi, hambatan dan tantangannya;</li> <li>2. Melakukan inventarisasi permasalahan dalam proses monitoring dan evaluasi dampak pengembangan KEK di Jawa Barat sebagai bahan acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan KEK di Jawa Barat</li> </ol>		Biro Perekonomian
		Regenerasi Petani	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring penerapan teknologi dalam sektor pertanian meliputi intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan produksi dan produktivitas pengolahan hasil pertanian serta pembentukan ekosistem pertanian yang baik</li> <li>2. Monitoring upaya pengembangan usaha petani muda dan pembentukan ekosistem pertanian berbasis</li> </ol>	Point 1 bertujuan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja sektor pertanian, membentuk ekosistem pertanian yang mandiri dan meningkatkan pendapatan petani	Biro Perekonomian



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				<p>teknologi untuk menyelesaikan masalah keterbatasan tenaga kerja pertanian;</p> <p>3. Monitoring Penyediaan akses pemasaran, pembiayaan melalui kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, akademisi, pelaku usaha dan komunitas serta stakeholders lainnya, dan</p> <p>4. Koordinasi terkait Peningkatan kualitas SDM petani melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan inkunbasi bisnis.</p>	melalui penerapan teknologi usaha tani tepat guna;	
		Pengembangan UMKM	Program Perekonomian dan Pembangunan	<p>1. Mengkoordinasikan kemitraan antar UMKM;</p> <p>2. Mengkoordinasikan Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar.</p>		Biro Perekonomian
		Percepatan Akses dan Keuangan Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi integrasi teknologi keuangan ( <i>fintech</i> ) dengan lebih baik dengan stakeholder terkait	Point 1, bertujuan antara lain: meningkatkan efisiensi, mempercepat layanan, dan memastikan keamanan transaksi. Ini bisa mencakup pengembangan aplikasi keuangan, pembayaran digital, dan platform <i>fintech</i> lainnya; serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses	Biro Perekonomian



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					keuangan yang lebih baik, termasuk pemberian kredit, pendanaan, dan dukungan lainnya.	
		Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Laporan Hasil Implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Sasaran Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Wilayah Jawa Barat;</li> <li>2. Menyusun telaahan terkait Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Sasaran Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Wilayah Jawa Barat;</li> <li>3. Menyusun Draft Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Sasaran Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Wilayah Jawa Barat tahun 2024;</li> </ol>	Point 1-3 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.	Biro Perekonomian
		Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan berbagai instansi dan pemangku kepentingan, termasuk dinas kelautan dan perikanan, institusi penelitian, serta sektor swasta;</li> <li>2. Memastikan kerja sama dan sinergi antar lembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam peningkatan pengelolaan sumber daya maritim.</li> </ol>		Biro Perekonomian
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Mengkoordinasikan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait pengelolaan sumber daya air dan ekosistem sungai di Jawa Barat secara berkelanjutan, memastikan ketersediaan air, dan melindungi lingkungan dari dampak negatif perubahan iklim dan aktivitas manusia melalui ditetapkannya Keputusan		Biro Perekonomian



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.		
			Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR);</li> <li>2. Pemantauan implementasi kebijakan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah;</li> <li>3. Menciptakan lingkungan konsumen yang lebih adil, memastikan perlindungan hak konsumen, dan mendorong penyedia barang/jasa untuk mematuhi standar etika bisnis dan regulasi yang berlaku, melalui penetapan personalia Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Jawa Barat;</li> <li>4. Pendampingan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah menghadapi hari-hari besar Keagamaan.</li> </ol>		Biro Perekonomian
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan dashboard ITKP dan P3DN;</li> <li>2. Memperbanyak etalase katalog, penyedia katalog, dan memperbanyak transaksi di katalog;</li> <li>3. Pemberian preferensi harga terhadap penggunaan produk dalam negeri.</li> </ol>		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Penugasan BUMD dalam Perekonomian Daerah		Fasilitasi terhadap permohonan penugasan program teknis Perangkat Daerah kepada BUMD.		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
		Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi melalui Kerja Sama Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Memfasilitasi penyusunan naskah kerja sama meliputi penajajaran, negosiasi, drafting dan penandatanganan naskah kerja sama terkait dengan penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama tersebut.		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
2	Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren		<ol style="list-style-type: none"> <li>mengirimkan 2 (dua) delegasi Imam asal Jawa Barat untuk ditempatkan di Masjid Al Hikmah New York, Amerika Serikat;</li> <li>Evaluasi <i>English for Ulama</i> (EFU) tahun 2023: Mengundang alumni EFU untuk melakukan paparan pengalaman selama menjadi Ulama EFU serta melakukan evaluasi terhadap program EFU;</li> <li>Open Data Pesantren: Mencari data pesantren di Jawa Barat yang berkolaborasi dengan OPD terkait. Data dari Open Data Pesantren akan digunakan untuk program-program Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren;</li> <li>Mendirikan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk pesantren: Pos Bantuan Hukum Pesantren untuk mendampingi santri/tenaga pendidik/pesantren yang memiliki masalah terkait dengan hokum;</li> <li>Mendirikan POSKESTREN (Pos Kesehatan Pesantren): Memberikan pendampingan serta fasilitas untuk kesehatan santri, dan tenaga pendidik berkolaborasi dengan tenaga kesehatan serta OPD terkait;</li> <li>Penyusunan Kajian Penyetaraan Pesantren: Penyusunan Kajian Penyetaraan Pesantren dengan tujuan gar pesantren di Jawa Barat setara.</li> </ol>		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)		Melaksanakan verifikasi dan validasi pencairan dana dan menghimpun Laporan Pertanggungjawaban BPMU tersebut.	Dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem	Biro Kesejahteraan Rakyat



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					<p>Pendidikan Nasional, dan mengakselerasi ketercapaian RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 di bidang Pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak beberapa tahun terakhir telah memberikan dukungan bantuan dana operasional kepada SMA, SMK, dan SLB agar seluruh anak usia sekolah dapat mengakses pendidikan. Dukungan biaya operasional tersebut direalisasikan melalui Dana Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Dana hibah ini diberikan untuk digunakan sebagai dukungan Biaya Operasional Sekolah secara berkelanjutan setiap tahunnya.</p>	
		Fasilitasi Kebijakan Vokasi Daerah		1. Pemantauan implementasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.157-Kesra/2022 tentang Komite Vokasi Daerah Provinsi Jawa Barat, dan akan dilaksanakan evaluasi di tahun 2024 berupa Telaahan;		Biro Kesejahteraan Rakyat



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2. Penyusunan perubahan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.157-Kesra/2022 tentang Komite Vokasi Daerah Provinsi Jawa Barat dikarenakan banyak nomenklatur yang berubah.		
		Kemitraan dengan Perguruan Tinggi		Mengkoordinasikan berbagai instansi dan pemangku kepentingan untuk membangun kerjasama antara perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan tinggi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan riset serta meningkatkan angka partisipasi kasar (APKK) perguruan tinggi di Jawa Barat.		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Memperbanyak etalase katalog, penyedia katalog, dan memperbanyak transaksi di katalog; 2. Pembinaan UKPBJ kabupaten/kota di Jawa Barat.		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Penanganan Stunting		Melakukan pembinaan terhadap unit kesehatan sekolah di kab/kota dalam Penanganan Stunting.		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Pengelolaan fitur Kinerja <i>Stunting</i> dalam aplikasi Japati (E-Sakip) <a href="https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip">https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip</a>		Biro Organisasi
		Penyusunan Kebijakan <i>Resilient and Sustainable System for Health Penanggulangan AIDS – Tuberculosis-Malaria (ATM)</i>		Kebijakan yang akan dipantau implementasinya: 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2022 tentang Eliminasi Malaria dan Pemeliharaan Eliminasi Malaria di Daerah Provinsi Jawa Barat; 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443.05/Kep.862-Kesra/2023		Biro Kesejahteraan Rakyat



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				<p>tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2023-2030;</p> <p>3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.644-Kesra/2023 tentang Komisi Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) di Daerah Provinsi Jawa Barat;</p> <p>4. Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan Sekretariat Kabupaten Kota Sehat (KKS) Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan adalah Fasilitasi Lokakarya Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah terkait Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) Tahun 2025 bagi Kabupaten/Kota.</p>		
		Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan BPJS Kesehatan		<p>Kebijakan yang akan dipantau implementasinya:</p> <p>1. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan di Jawa Barat Tahun 2023;</p> <p>2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.210-Kesra/2023 tentang Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023;</p> <p>3. Penjajakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Pendidik</p>		Biro Kesejahteraan Rakyat



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Bidang Keagamaan di Jawa Barat Tahun 2024 dan 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.210-Kesra/2023 tentang Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024; Pada Tahun 2024 sudah dianggarkan untuk Rp6.966.000.000 untuk 150.000 orang, dan program ini masih akan berlangsung pada tahun 2025.		
		Penilaian Kinerja BLUD bidang Kesehatan		1. Penyusunan kriteria kinerja BLUD Bidang Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; 2. Penentuan koordinator hasil penilaian dari Dewan Pengawas BLUD, Pembina Keuangan dan Pembina Teknis.		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan		Kebijakan yang akan dipantau implementasinya: 1. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan di Jawa Barat Tahun 2023; 2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.210-Kesra/2023 tentang Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2023; 3. peninjauan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan di Jawa Barat Tahun 2024 dan		Biro Kesejahteraan Rakyat



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.210-Kesra/2023 tentang Tenaga Pendidik Bidang Keagamaan Daerah Provinsi Jawa Barat Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024; Pada Tahun 2024 sudah dianggarkan untuk Rp6.966.000.000 untuk 150.000 orang.		
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan berbagai instansi dan pemangku kepentingan terkait Memberikan apresiasi kepada perorangan, kelompok, atau badan usaha atas peran aktifnya dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>2. Menilai prestasi perorangan, kelompok, atau aparatur pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Penilai Lomba Wana Lestari Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;</li> <li>3. Mengkoordinasikan berbagai instansi dan pemangku kepentingan dalam hal Mendorong partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam menjaga, mengelola, dan merawat lingkungan dan hutan Indonesia; Mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan melalui langkah-langkah dan aksi nyata serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan; Kampanye global yang mengajak penduduk dunia mulai dari individu, komunitas, korporasi, hingga pemerintah untuk</li> </ol>		Biro Perekonomian



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				bersama-sama peduli terhadap upaya penurunan emisi karbon dioksida (CO <sub>2</sub> ) yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global sehingga berdampak pada perubahan iklim melalui surat edaran tentang Gerakan <i>Global Switch Off Earth Hour</i> .		
5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Kerja sama Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur		Memfasilitasi penyusunan naskah kerja sama Daerah meliputi penjajakan, negosiasi, <i>drafting</i> dan penandatanganan naskah kerja sama dalam pembangunan infrastruktur serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama tersebut.		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Monitoring TPPAS Regional, SPAM Regional		<ol style="list-style-type: none"> <li>Berpartisipasi dalam penyusunan MoU dengan Pihak Ketiga;</li> <li>Berpartisipasi dalam survey ke Lokasi untuk Monitoring TPPAS Regional dan SPAM Regional.</li> </ol>		Biro Perekonomian
		Pembentukan BUMD Pengelola Transportasi Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi dan koordinasi penyusunan kajian rencana pendirian BUMD Transportasi;</li> <li>Fasilitasi dan koordinasi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan.</li> </ol>		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
		Inisiasi Penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah dan <i>Creative Financing</i>		Inisiator alternatif pembiayaan infrastruktur pembangunan daerah.		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
		Penugasan BUMD dalam Penyediaan Infrastruktur		Fasilitasi terhadap permohonan penugasan program teknis Perangkat Daerah kepada BUMD.		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
		Infrastruktur Perkotaan	Program Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Pemeliharaan masjid lingkup BPIC dan Al jabbar;</li> <li>Fasilitasi Pengusulan Calon Gelar Pahlawan Nasional.</li> </ol>		Biro Kesejahteraan Rakyat



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Transformasi Digital	Program Penataan Organisasi	Penerapan Aplikasi SURABI pada 27 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat secara terintegrasi dalam satu sistem.		Biro Organisasi
			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Pembuatan dashboard ITKP dan P3DN; 2. Pembuatan dashboard monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa lingkup perangkat daerah dan kabupaten/kota di Jawa Barat.		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Pengelolaan fitur Kinerja <b>Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)</b> dalam aplikasi Japati (E-Sakip) <a href="https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip">https://kinerja.jabarprov.go.id/sakip</a>		Biro Organisasi
6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Peningkatan Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Daerah		1. Melakukan pembinaan terhadap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) dalam peningkatan persyaratan 7 (tujuh) parameter kapasitas daerah yakni geografi, demografi, keamanan, sospol adat dan budaya, potensi ekonomi, keuangan daerah dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan kabupaten induk melaksanakan updating data kapasitas daerah dari tiap-tiap CDPOB masing-masing indikator yang masih kurang atau rendah; 2. Melakukan pengawasan, penguatan atau pengawalan terhadap pemerintah pusat atas diusulkannya Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru dari masing-masing kabupaten di Jawa Barat.		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Kerja Sama Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik, Manajemen ASN		Implementasi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dengan mitra luar negeri		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Implementasi aplikasi <i>west java partnership</i> dalam rangka pelayanan fasilitasi naskah kerja sama daerah, dan pelayanan ijin perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
			Program Penataan Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak;</li> <li>2. Redesain Organisasi Berbasis Kinerja;</li> <li>3. Survei Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK;</li> <li>4. Melaksanakan Pembinaan kepada Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam hal pelayanan publik;</li> <li>5. Membuat Regulasi untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;</li> <li>6. Monitoring Keberlanjutan Data Layanan Dengan Memastikan kesesuaian layanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;</li> <li>7. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;</li> <li>8. Menyusun proses bisnis provinsi;</li> <li>9. Kebermanfaatan Japati dalam peningkatan kinerja provinsi.</li> </ol>		Biro Organisasi
			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri (PDN);</li> <li>2. Pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan pengadaan secara elektronik.</li> </ol>		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan JDIIH Provinsi Jawa Barat dalam hal Pengembangan website JDIIH di fitur pencarian;</li> <li>2. Pembuatan <i>Podcast</i> Bincang-Bincang Hukum.</li> </ol>		Biro Hukum dan HAM



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Good Corporate Governance (GCG) Campaign</i> dan Penilaian GCG BUMD;</li> <li>2. Penyusunan Masterplan BUMD 2025-2030.</li> </ol>		Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Pelayanan Pimpinan melalui Redesign Proses Bisnis;</li> <li>2. Maintenance Aplikasi SELARAS;</li> <li>3. Maintenance Aplikasi e-CLIP;</li> <li>4. Keberlanjutan Kegiatan SIMPUL JABAR.</li> </ol>		Biro Administrasi Pimpinan
		Bantuan Hukum Masyarakat Miskin		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum Daerah Provinsi Jawa Barat (SIDBANKUMDA);</li> <li>2. <i>Reimbursement</i> Biaya Perkara sebagai bentuk bantuan hukum untuk Masyarakat miskin.</li> </ol>		Biro Hukum dan HAM
		Pelayanan Publik Berbasis HAM		Implementasi Peraturan Gubernur terkait Pelayanan Publik berbasis HAM		Biro Hukum dan HAM
		Peningkatan Layanan Publik di Sekretariat Daerah		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi dan Pengamanan Gedung Sate sebagai Aset Cagar Budaya Heritage dan Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;</li> <li>2. Optimalisasi Layanan Satu Pintu Gesat;</li> <li>3. Penyediaan dan Peningkatan Fasilitas Layanan Publik Sekretariat Daerah;</li> <li>4. Pembentukan Tim Khusus Implementasi RB di lingkungan Sekretariat Daerah;</li> <li>5. Peningkatan Kompetensi Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;</li> <li>6. Optimalisasi Unit Kearsipan dan Record Center Setda dalam Pengamanan &amp; Penyelamatan Arsip Vital;</li> </ol>		Biro Umum



35B6B8A6A5

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan	Dukungan Program Prioritas	Bentuk Dukungan Biro	Keterangan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				7. Optimalisasi Layanan Museum Gedung Sate.		
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa		Pembuatan dashboard monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa lingkup perangkat daerah dan kabupaten/kota di Jawa Barat.		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji		Biro Kesejahteraan Rakyat



35B6B8A6A5

## **BAB 4**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan gambaran rencana kerja dari Sekretariat Daerah dan Biro-biro di bawahnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk menjabarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026.

Penentuan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat pada tahun berkenaan, dengan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan di Tahun 2025 merupakan integrasi perencanaan program dan kegiatan dari semua biro yang ada di Sekretariat Daerah sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Dalam merumuskan program dan kegiatan tersebut, dilakukan melalui beberapa tahap perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder terkait sebagai penerima manfaat hasil dan fasilitasi serta koordinasi kerja.

Program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 berjumlah 8 (delapan) program, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 740.964.460.330,00 (tujuh ratus empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Adapun seluruh anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan direncanakan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu anggaran untuk tahun 2025 tercantum pada lampiran.



**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat**

**UPDATE TABLE OMANDRI TERBARU DI DRIVE YADIN**



35B6B8A6A5

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2025, Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 8 (delapan) program, yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 89 (delapan puluh sembilan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 740.964.460.330,00 (tujuh ratus empat puluh milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Namun begitu perlu dicatat bahwa program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja ini sifatnya masih indikatif. Sehingga dalam pelaksanaannya masih dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi pembiayaan/ anggaran ataupun keuangan daerah yang tersedia.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

## LAMPIRAN



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	400,000,000			100	440,000,000		
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A		10	400,000,000			10	440,000,000		
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	687,508,244			100	756,259,068		
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A		12	687,508,244			12	756,259,068		
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Harmonis	Persen	87.99	N/A	85	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	87.1	6,275,000,000	APBD Prov. Jabar	87.99	7,224,500,000	Biro Hukum dan HAM Setda Jabar
1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pembentukan Hukum Daerah Provinsi	Persen	100	N/A	100		100	3,995,000,000			100	4,526,500,000		
01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	90	30	30		30	1,150,000,000			30	1,265,000,000		
02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	2400	800	800		800	170,000,000			800	187,000,000		
03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	36	12	12		12	2,015,000,000			12	2,216,500,000		
04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen	630	210	210		210	660,000,000			210	858,000,000		
1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan HAM yang Difasilitasi	Persen	100	N/A	100		100	2,280,000,000			100	2,698,000,000		
01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus	45	N/A	15		15	950,000,000			15	1,235,000,000		
02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	75	N/A	25		25	1,330,000,000			25	1,463,000,000		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Hukum dan HAM	Poin	88.25	N/A	86.51	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	92.00	2,575,000,000	APBD Prov. Jabar	92.50	3,567,764,176	Biro Hukum dan HAM Setda Jabar
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun Sesuai Ketentuan	Persen	100	N/A	100		100	20,000,000			100	22,000,000		
08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1	20,000,000			1	22,000,000		
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi; 2) Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi.	Persen	100 100	N/A	100 100		100 100	2,427,000,000			100 100	302,506,776		
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	15	12	5		5	200,998,000			5	221,097,800		
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Paket	15	10	5		5	26,002,000			5	28,602,200		
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12		12	2,200,000,000			12	2,420,000,000		
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	128,000,000			100	140,800,000		
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A		18	128,000,000			10	140,800,000		



35B6B8A6A5

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
4	1	4		<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Poin</b>	<b>50.25</b>	<b>N/A</b>	<b>50.15</b>	<b>Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat</b>	<b>50.2</b>	<b>209,692,396,500</b>	<b>APBD Prov. Jabar</b>	<b>50.25</b>	<b>230,661,636,150</b>	<b>Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar</b>	
			1.01	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>Persentase Kebijakan Pembinaan Mental Spiritual yang Diimplementasikan secara Tepat</b>	<b>Persen</b>	<b>71.41</b>	<b>N/A</b>	<b>70</b>		<b>70.7</b>	<b>68,092,396,500</b>		<b>71.41</b>	<b>74,901,636,150</b>		
				01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	9	5	9		9	9,948,839,330		9	10,943,723,263		
				02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga	45	9	15		15	58,143,557,170		15	63,957,912,887		
			1.02	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>Persentase Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat</b>	<b>Persen</b>	<b>71.41</b>	<b>N/A</b>	<b>70</b>		<b>70.7</b>	<b>139,800,000,000</b>		<b>71.41</b>	<b>153,780,000,000</b>		
				01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	9	8	3		3	138,200,000,000		3	152,020,000,000		
				02 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	15	5	5		5	700,000,000		5	770,000,000		
				03 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	15	2	5		5	900,000,000		5	990,000,000		
			1.03	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>Persentase Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Diimplementasikan secara Tepat</b>	<b>Persen</b>	<b>71.41</b>	<b>N/A</b>	<b>70</b>		<b>70.7</b>	<b>1,800,000,000</b>		<b>71.41</b>	<b>1,980,000,000</b>		
				01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	9	5	3		3	700,000,000		3	770,000,000		
				02 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	15	19	5		5	700,000,000		5	770,000,000		
				03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	9	3	3		3	400,000,000		3	440,000,000		
4	1	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Poin</b>	<b>92.25</b>	<b>N/A</b>	<b>90.84</b>	<b>Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat</b>	<b>91.34</b>	<b>17,103,910,670</b>	<b>APBD Prov. Jabar</b>	<b>92.25</b>	<b>18,814,301,737</b>	<b>Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar</b>	
			1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>150,000,000</b>		<b>100</b>	<b>165,000,000</b>		



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
	08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A		7	150,000,000			7	165,000,000	
	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi; 2) Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi; 3) Persentase Biro yang Terlayani Arsip Dinamis.	Persen	100	N/A	100		100	7,226,476,161			100	7,949,123,777	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	36	12	12		12	300,000,000			12	330,000,000	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12		12	3,021,607,541			12	3,323,768,295	
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	N/A	N/A	N/A		3	3,904,868,620			3	4,295,355,482	
	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	396,200,000			100	435,820,000	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A		20	396,200,000			25	435,820,000	
	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	9,331,234,509			100	10,264,357,960	
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	12		12	9,331,234,509			12	10,264,357,960	
4	1	6	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian	Poin	50.25	N/A	50.15	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	50.2	6,610,445,681	APBD Prov. Jabar	50.25	6,940,967,965	Biro Perekonomian Setda Jabar
	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Sarana Perekonomian yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	151.51	N/A	50		50.5	2,909,870,000		51.01	3,055,363,500	
	01		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	17	8	5		6	1,500,000,000		6	1,575,000,000	
	02		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	14	9	4		5	1,409,870,000		5	1,480,363,500	
	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	151.51	N/A	50		50.5	3,700,575,681		51.01	3,885,604,465	
	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen	20	10	6		7	3,500,575,681		7	3,675,604,465	
	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	8	5	2		3	100,000,000		3	105,000,000	
	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	5	4	1		2	100,000,000		2	105,000,000	
4	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Perekonomian	Poin	95.39	N/A	95.2	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	95.29	3,845,371,445	APBD Prov. Jabar	95.39	3,922,446,957	Biro Perekonomian Setda Jabar
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun Sesuai Ketentuan	Persen	100	N/A	100		100	94,954,000		100	363,000,000	
	08		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A		2	94,954,000		2	99,701,700	



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi; 2) Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi.	Persen	100	N/A	100		100; 100	3,011,856,022			100	219,978,000		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	36	4	12		12	250,002,173		12	262,502,282		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12		12	2,761,853,849		12	3,038,039,234		
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	98,932,000			100	103,878,600		
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A		8	98,932,000		10	103,878,600		
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	639,629,423			100	671,610,894		
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A		12	639,629,423		12	671,610,894		
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD	Poin	50.25	N/A	50.15	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	50.2	4,878,789,132	APBD Prov. Jabar	50.25	5,366,668,045	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Jabar
		1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Kebijakan Investasi Daerah yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	51.01	N/A	50		50.5	1,967,374,500		51.01	2,164,111,950	
		02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	15	9	5		5	1,967,374,500		5	2,164,111,950	
		1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMN dan BLUD	Persentase Kebijakan Bidang BUMD, Investasi, dan BLUD yang Diimplementasikan secara Tepat	Persen	51.01	N/A	50		50.5	2,911,414,632		51.01	3,202,556,095	
		01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	18	6	6		6	984,202,300		6	1,082,622,530	
		02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	18	11	6		6	1,527,212,332		6	1,679,933,565	
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	9	6	3		3	400,000,000		3	440,000,000	
4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Keselarasan Penyusunan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan lingkup Administrasi Pembangunan	Persen	100	N/A	100	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	100	300,000,000	APBD Prov. Jabar	100	330,000,000	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Jabar
		1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Disampaikan	Dokumen	12	N/A	4		4	300,000,000		4	330,000,000	
		01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	12	5	4		4	300,000,000		4	330,000,000	
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan	Poin	90.74	N/A	88.95	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	89.94	2,333,766,222	APBD Prov. Jabar	90.74	3,656,088,912	Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Jabar



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun Sesuai Ketentuan	Persen	100	N/A	100		100	4,600,000			100	5,060,000		
	08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	4	4,600,000			4	5,060,000		
1.05	Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Pegawai yang Meningkat Kompetensinya	Persen	0	N/A	100		100	99,270,000			100	122,933,822		
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	156	50	52	52	99,270,000			52	109,197,000		
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi; 2) Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi.	Persen	100	N/A	100		100	1,121,994,698			100	419,700,158		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	36	12	12	12	155,670,100			12	171,237,110		
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	3	64,221,000			3	70,643,100		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	902,103,598			12	992,313,958		
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi	Persen	N/A	N/A	N/A		100	302,110,000			100	332,321,000		
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	22	302,110,000			22	332,321,000		
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi	Persen	100	N/A	100		100	805,791,524			100	855,314,937		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	168,466,670			12	185,313,337		
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	10	12	12	12	637,324,854			12	701,057,339		
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Level Maturitas UKPBJ	Level	3	3	3	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	3	5,911,000,000	APBD Prov. Jabar	3	6,502,100,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar
	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1) Persentase Proses Pemilihan Penyedia yang Tepat Waktu; 2) Persentase Pengadaan Barang Jasa yang Dilaksanakan Tepat Sasaran	Persen	100	N/A	96		100; 100	2,200,000,000		100	2,420,000,000	
		01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	45	12	10		12	300,000,000		12	330,000,000	
		02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	36	12	12		12	1,100,000,000		12	1,210,000,000	
		03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	36	12	12		12	800,000,000		12	880,000,000	
	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1) Persentase Peningkatan Fitur Sistem Informasi Pengadaan; 2) Persentase Layanan SPSE yang Dipenuhi	Persen	100	N/A	96		100; 100	2,276,000,000		100	2,503,600,000	
		01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	36	12	12		12	500,000,000		12	550,000,000	
		02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	36	12	12		12	1,572,000,000		12	1,729,200,000	
		03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	36	12	12		12	204,000,000		12	224,400,000	
	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1) Persentase Permasalahan Barang dan Jasa yang Diselesaikan;	Persen	100	N/A	96		100; Lvl. 3	1,435,000,000		100	1,578,500,000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
		01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	280	30	90		91	535,000,000			91	588,500,000	
		02	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	36	12	12		12	550,000,000			12	605,000,000	
		03	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	36	12	12		12	350,000,000			12	385,000,000	
4	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Poin</b>	<b>97.01</b>	<b>N/A</b>	<b>96.82</b>	<b>Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat</b>	<b>96.91</b>	<b>3,524,000,000</b>	<b>APBD Prov. Jabar</b>		<b>97.01</b>	<b>3,876,400,000</b>	<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar</b>
		1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>10,000,000</b>			<b>100</b>	<b>11,000,000</b>	
		08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1	10,000,000			1	11,000,000	
		1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>Persentase Pegawai yang Meningkatkan Kompetensinya</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>220,000,000</b>			<b>100</b>	<b>242,000,000</b>	
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	72	40	22		24	220,000,000			26	242,000,000	
		1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1) Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi; 2) Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi.</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100; 100</b>	<b>2,570,000,000</b>			<b>100</b>	<b>2,827,000,000</b>	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	3	4	1		1	400,000,000			1	440,000,000	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	3	5	1		1	170,000,000			1	187,000,000	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12		12	2,000,000,000			12	2,200,000,000	
		1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		<b>100</b>	<b>210,509,263</b>			<b>100</b>	<b>231,560,189</b>	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A		5	210,509,263			5	231,560,189	
		1.09	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>513,490,737</b>			<b>100</b>	<b>564,839,811</b>	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	12		12	513,490,737			12	564,839,811	
4	1	2	<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>						<b>Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat</b>		<b>3,360,000,000</b>	<b>APBD Prov. Jabar</b>			<b>3,696,000,000</b>	<b>Biro Organisasi Setda Jabar</b>
				<b>1) Peringkat Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur</b>	<b>Peringkat</b>	<b>37,38</b>	<b>N/A</b>	<b>37,38</b>		<b>37,38</b>				<b>37,38</b>		
		1.01	<b>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>1) Presentase Perangkat Daerah yang Ditata Kelembagaannya; 2) Indikator Kepuasan Masyarakat Pelayanan Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota;</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>80</b>		<b>100; 85; 100</b>	<b>910,000,000</b>			<b>100; 90; 100</b>	<b>1,001,000,000</b>	



35B6B8A6A5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
			<b>3) Persentase Peta Jabatan Yang Sesuai Anjab Hasil Verifikasi</b>												
	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	Dokumen	111	1	37		37	300,000,000			37	330,000,000	
	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	81	27	27		27	400,000,000			27	440,000,000	
	03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Dokumen	141	47	47		47	210,000,000			47	231,000,000	
			<b>2) Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Minimal kategori "B"</b>	Persen	100	N/A	92		94				100		
	1.02	<b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>1) Persentase Kebijakan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang diinternalisasikan; 2) Persentase Perangkat Daerah dengan Pelaporan Kinerja Berkualitas; 3) Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Budaya Kerja; 4) Persentase Kebijakan Sistem Kerja Dinamis yang Sesuai Ketentuan; 5) Presentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar Pelayanan</b>	Persen	100	N/A	100		100; 100; 100; 100; 85	2,450,000,000			100; 100; 100; 100; 90	2,695,000,000	
	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Dokumen	3	1	1		1	450,000,000			1	495,000,000	
			<b>3) Nilai Pelaporan Kinerja</b>	Poin	12,54	N/A	12,35		12,44						
	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Dokumen	114	1	38		38	500,000,000			38	550,000,000	
			<b>4) Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Budaya Kerja minimal "Baik"</b>	Persen	100	N/A	100		100		100				
	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Laporan	3	1	1		1	300,000,000			1	330,000,000	
			<b>5) Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Sistem Kerja Dinamis</b>	Persen	100	N/A	100		100				100		
	04	Pengelolaan Tatalaksanaan Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan tatalaksana pemerintahan	Dokumen	3	1	1		1	500,000,000			1	550,000,000	
			<b>9) Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik</b>	Persen	90	N/A	80		85				90		
	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Dokumen	114	1	38		38	700,000,000			38	770,000,000	
4	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Organisasi</b>	Poin	89.47	N/A	91.00	Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat	91.57	1,320,000,000	APBD Prov. Jabar	92.14	1,452,000,000	Biro Organisasi Setda Jabar
	1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun Sesuai Ketentuan</b>	Persen	100	N/A	100		100	7,000,000				7,700,000	
	08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A		1	7,000,000			1	7,700,000	
	1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1) Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi; 2) Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi.</b>	Persen	100	N/A	100		100; 100	1,162,708,300			100	1,278,979,130	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	36	2	12		12	115,530,000			12	127,083,000	



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	36	2	12		12	30,000,000		12	33,000,000		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	48	12		12	1,017,178,300		12	1,118,896,130		
	1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		100	<b>150,291,700</b>			<b>165,320,870</b>		
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A		12	150,291,700		15	165,320,870		
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>Poin</b>	<b>94.8</b>	<b>N/A</b>	<b>94.61</b>	<b>Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat</b>	<b>94.71</b>	<b>55,514,865,349</b>	<b>APBD Prov. Jabar</b>	<b>95,61</b>	<b>73,764,891,791</b>	<b>Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar</b>
		1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun Sesuai Ketentuan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>50,000,000</b>		<b>100</b>	<b>75,000,000</b>	
		08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A		4	50,000,000		4	75,000,000	
		1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1) Persentase Sarana dan Prasarana Biro yang Dipenuhi; 2) Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi.</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>4,324,904,795</b>		<b>100</b>	<b>4,285,095,038</b>	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	9	2	3		3	202,551,924		3	400,000,000	
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6	2	2		2	239,139,650		2	314,373,806	
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12		12	3,883,213,221		12	3,570,721,232	
		1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro yang Dipenuhi Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		100	<b>357,407,905</b>		<b>100</b>	<b>1,200,000,000</b>	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A		30	357,407,905		120	1,200,000,000	
		1.09	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Jasa Penunjang Biro yang Dipenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>		100	<b>357,407,906</b>		<b>100</b>	<b>4,500,000,000</b>	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A	N/A	N/A		12	357,407,906		12	4,500,000,000	
		1.12	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan yang Dipenuhi</b>		<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>28,102,218,217</b>		<b>100</b>	<b>30,639,651,396</b>	
		01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	36	12	12		12	13,259,951,568		12	12,560,176,190	
		02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	36	12	12		12	7,325,577,380		12	9,809,313,454	
		03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	36	12	12		12	7,516,689,269		12	8,270,161,752	
		1.13	<b>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Pimpinan yang Dipenuhi</b>		<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>14,833,669,322</b>		<b>100</b>	<b>25,930,577,702</b>	
		01	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	36	12	12		12	3,240,440,113		12	7,900,000,000	
		02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Laporan	36	12	12		12	5,384,061,671		12	10,040,000,000	
		03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	36	12	12		12	6,209,167,538		12	7,990,577,702	
		1.14	<b>Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>Persentase Layanan Keprotokolan yang Dipenuhi</b>		<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>7,489,257,204</b>		<b>100</b>	<b>9,815,476,812</b>	
		01	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	36	12	12		12	2,350,477,618		12	3,188,123,532	



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	36	12	12		12	1,697,735,521			12	2,286,775,332	
	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	36	12	12		12	3,441,044,065			12	4,340,577,948	
4	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Biro Umum</b>	<b>Poin</b>	<b>92.5</b>	<b>N/A</b>	<b>90.68</b>	<b>Luar dan Dalam Provinsi Jawa Barat</b>	<b>91.58</b>	<b>395,569,915,331</b>	<b>APBD Prov. Jabar</b>	<b>92.5</b>	<b>395,569,915,331</b>	<b>Biro Umum Setda Jabar</b>
		1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								<b>736,268,435</b>			<b>736,268,435</b>	
				<b>Nilai Komponen Perencanaan dan Pengukuran Sekretariat Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>26.2</b>	<b>N/A</b>	<b>26.15</b>		<b>26.18</b>	<b>378,881,465</b>		<b>26.2</b>	<b>378,881,465</b>	
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	34	3	11	11	338,881,465		12	338,881,465	
			08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	3	30,000,000			30,000,000	
			10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	9	10,000,000			10,000,000	
				<b>Persentase Dokumen Perencanaan Biro yang Disusun sesuai Ketentuan</b>	<b>Poin</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>89,521,485</b>		<b>100</b>	<b>89,521,485</b>	
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	9	3	3	3	89,521,485		3	89,521,485	
				<b>Nilai Komponen Pelaporan dan Evaluasi Sekretariat Daerah</b>	<b>Poin</b>	<b>16.14</b>	<b>N/A</b>	<b>16.11</b>		<b>16.13</b>	<b>267,865,485</b>		<b>16.14</b>	<b>267,865,485</b>	
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	54	16	18	18	267,865,485		18	267,865,485	
		1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>195,800,001,328</b>			<b>195,800,001,328</b>	
				<b>Persentase Pegawai dan Pimpinan yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>194,946,769,049</b>		<b>100</b>	<b>194,946,769,049</b>	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	750	800	750	750	194,946,769,049		750	194,946,769,049	
				<b>Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>N/A</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>853,232,279</b>		<b>12</b>	<b>853,232,279</b>	
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	12	12	12	468,751,002		12	468,751,002	
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	36	12	12	12	70,215,865		12	70,215,865	
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	26,300,000		1	26,300,000	-
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	16	16	16	287,965,412		16	287,965,412	
		1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah yang Diamankan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>952,354,895</b>		<b>100</b>	<b>952,354,895</b>	
			06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	12	12	12	952,354,895		12	952,354,895	



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								1,525,139,500			1,525,139,500		
		<b>Persentase Pegawai yang Terlayani Tepat Waktu</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>346,894,500</b>		<b>100</b>	<b>346,894,500</b>		
	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	36	700	12	12	346,894,500		12	346,894,500		
		<b>Persentase Pegawai yang Memenuhi Syarat Kompetensi Jabatan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>1,178,245,000</b>		<b>100</b>	<b>1,178,245,000</b>		
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1500	100	500	500	1,178,245,000		500	1,178,245,000		
1.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								28,057,038,117			28,057,038,117		
		<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang dipenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>26,651,174,271</b>		<b>100</b>	<b>26,651,174,271</b>		
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	60	12	20	20	585,463,500		20	585,463,500		
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	225	12	75	75	15,656,280,271		75	15,656,280,271		
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	12	12	12	9,452,650,000		12	9,452,650,000		
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	N/A	20	20	956,780,500		20	956,780,500		
		<b>Persentase Kebutuhan Akomodasi Pimpinan yang Dipenuhi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>610,315,846</b>		<b>100</b>	<b>610,315,846</b>		
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	610,315,846		12	610,315,846		
		<b>Persentase Biro yang Terlayani Arsip Dinamis</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>795,548,000</b>		<b>100</b>	<b>795,548,000</b>		
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	36	12	12	12	795,548,000		12	795,548,000		
1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								7,180,210,135			7,180,210,135		
	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	N/A	N/A	N/A	1	6,000,000,000		1	6,000,000,000		
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	36	N/A	12	12	1,180,210,135		12	1,180,210,135		
1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								88,263,996,848			88,263,996,848		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	5,719,933,563		12	5,719,933,563		
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	82,544,063,285		12	82,544,063,285		
1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								32,969,949,556			32,969,949,556		
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1000	N/A	1000	1000	11,051,003,556		1000	11,051,003,556		
	0'9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	20	N/A	20	20	8,409,394,000		20	8,409,394,000		
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	23	N/A	23	23	13,509,552,000		23	13,509,552,000		
1.11	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>								31,239,257,939			31,239,257,939		
		<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>31,239,257,939</b>		<b>100</b>	<b>31,239,257,939</b>		



35B6B8A6A5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian Renja Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Tahun 2024	Lokasi	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		Indikator	Satuan					Target 2025	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
		<b>Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Dipenuhi</b>													
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2		2	2,491,161,599			2	2,491,161,599	
	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	2	2		2	28,748,096,340			2	28,748,096,340	
	1.12	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>N/A</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>8,845,698,578</b>			<b>100</b>	<b>8,845,698,578</b>	
	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	36	N/A	12		12	8,845,698,578			12	8,845,698,578	



35B6B8A6A5

**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

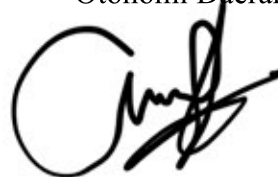
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah,



( PRAMUDIA SANTOSA, A.Md.Kb.N. )

*Liaison Officer* Biro Pemerintahan dan  
Otonomi Daerah,



( TB. MOCHARDAN HAKIKI, S.STP )

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



( EFFI AFFIANTI, S.S., M.A.P. )



**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biro Hukum dan HAM,

*Liaison Officer* Biro Hukum dan HAM,



( ADE MULYANI K, S.AP )



( ANITA PUTERI UTAMI, S.I.P., M.A.P )

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



( EFFI AFFIANTI, S.S., M.A.P. )



**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

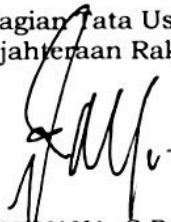
Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan; sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tata Usaha Biro  
Kesejahteraan Rakyat,



RINA MULYANA, S.Pd., M.Si  
NIP. 197706262001122002

Liaison Officer Biro Kesejahteraan  
Rakyat



Zania Ardianne, S.H., M.A.P  
NIP. 198701062015032004

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



Effi Affianti, S.S., M.A.P  
NIP. 197212242007012001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

 Dipindai dengan CamScanner

**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tata Usaha  
Biro BUMD, Investasi dan Administrasi  
Pembangunan,



(Endah Firliyah, S.Sos.)

*Liaison Officer* Biro BUMD, Investasi dan  
Administrasi Pembangunan,



(Andry A. Gunadarma D., S.E., M.M.)

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



(Effi Affianti, S.S., M.A.P.)



**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biro Perekonomian,

*Liaison Officer* Biro Perekonomian,



( ADITYA DANISWARA S, S.I.P., M.M )

( ANITA PUTERI UTAMI, S.I.P., M.A.P )

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



( EFFI AFFIANTI, S.S., M.A.P. )



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/35B6B8A6A5>

35B6B8A6A5

**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

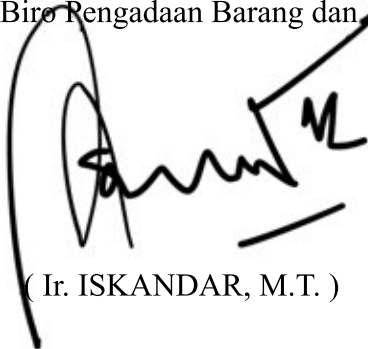
Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa



( Ir. ISKANDAR, M.T. )

*Liaison Officer* Biro Pengadaan  
Barang dan Jasa



( WIDA KASWATI S, S.Sos., MAP )

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



( EFFI AFFIANTI, S.S., M.A.P. )



**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

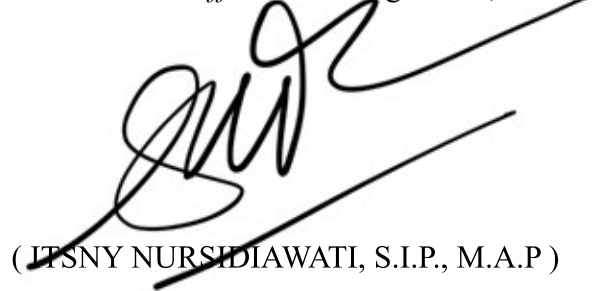
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biro Organisasi,



( KAMAL MUHAFAZH, S.I.P )

*Liaison Officer* Biro Organisasi,



( IRSNY NURSIDIAWATI, S.I.P., M.A.P )

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



( EFFI AFFIANTI, S.S., M.A.P. )



**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biro Administrasi Pimpinan,



(NILA SEPTIATI, S.P., M.M)

*Liaison Officer* Biro Administrasi Pimpinan,



(NURUL MILLAH, S.IP., M.Tr.A.P)

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



(EFFI AFFIANTI, S.S., M.A.P.)



**BERITA ACARA PERSETUJUAN**  
**Dokumen Rencana Kerja (Renja)**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan masukan dan usulan dari Biro-biro serta hasil kajian dari Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2024, telah dilakukan analisis, pembahasan dan review oleh Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap dokumen Renja Setda 2025, yang meliputi:

1. Uraian, analisis maupun kesimpulan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025 mulai dari BAB I. Pendahuluan, hingga BAB V. Penutup;
2. Seluruh data maupun informasi terkait kebijakan, sasaran, termasuk indikator kinerja dan target kinerja telah tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025;
3. Data lainnya yang tercantum dalam tabel, gambar maupun diagram turut tercantum dalam dokumen Renja Setda 2025.

Bahwa berdasarkan analisis, pembahasan dan review tersebut, maka Biro-biro serta Tim Fungsional Perencana di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ini menyatakan menyetujui dan bertanggungjawab atas seluruh isi dokumen Renja Setda 2025 diatas.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biro Umum,



(ASTRI PERMATA SARI, S.Sos)

*Liaison Officer* Biro Umum,



(IDEN GILANG A, S.E., M.M)

Kepala Bagian Tata Usaha  
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat,



(EFFI AFFIANTI, S.S., M.A.P.)

